

- PORNOGRAPHY - SOCIAL ASPECTS
- EROTICA

KK
KKB
363.47
Sur
P.



LAPORAN PENELITIAN
DIK RUTIN UNIVERSITAS AIRLANGGA
TAHUN ANGGARAN 2003

**POLITIK TUBUH DAN SENSUALITAS PEREMPUAN:
DISKURSUS MEDIA TERHADAP FENOMENA GOYANG
PENYANYI DANGDUT PEREMPUAN**



010704141

Peneliti:

Yuyun W.I. Surya, S.Sos, MA
Dra. Rachmah Ida, MA



010704141

LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Dibiayai Oleh Dana DIK Rutin Universitas Airlangga Tahun 2003
SK Rektor Universitas Airlangga Nomor 4623/J03/PG/2003
Tanggal 13 Juni 2003
Nomor Urut 30

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

Nopember, 2003



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS AIRLANGGA
LEMBAGA PENELITIAN

1. Puslit Pembangunan Regional
2. Puslit Obat Tradisional
3. Puslit Pengembangan Hukum (5923584)
4. Puslit Lingkungan Hidup (5995718)
5. Puslit Pengembangan Gizi (5995720)
6. Puslit/Studi Wanita (5995722)
7. Puslit Olah Raga
8. Puslit Bioenergi
9. Puslit Kependudukan dan Pembangunan (5995719)
10. Puslit/ Kesehatan Reproduksi

Kampus C Unair, Jl. Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5995246, 5995248, 5995247 Fax. (031) 5962066
E-mail : lpunair@rad.net.id - http://www.geocities.com/Athens/Olympus/6223

IDENTITAS DAN PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN

1. Judul Penelitian : Politik Tubuh Dan Sensualitas Perempuan :
Diskursus Media Terhadap Fenomena Goyang
Penyanyi Dangdut Perempuan
- a. Macam Penelitian : Fundamental Terapan Pengembangan
- b. Kategori Penelitian : I II III
2. Kepala Poyek Penelitian
- a. Nama lengkap dan Gelar : Yuyun W.I. Surya, MA.
- b. Jenis kelamin : Perempuan
- c. Pangkat/Golongan dan NIP : Penata Muda (Gol. III/a) 132164002
- d. Jabatan Sekarang : Staf Pengajar
- e. Fakultas/Puslit/Jurusan : FISIP
- f. Univ/Ins./Akademi : Universitas Airlangga
- g. Bidang Ilmu yang diteliti : Sosiologi
3. Jumlah Tim Peneliti : 2 (dua) orang
4. Lokasi Penelitian :
5. Kerjasama dengan Instansi lain
- a. Nama Instansi : -
- b. A l a m a t : -
6. Jangka waktu penelitian : 6 (enam) bulan
7. Biaya yang diperlukan : Rp. 3.500.000,00
8. Hasil Penelitian () Baik Sekali (V) Baik
() Sedang () Kurang

Surabaya, 11 Nopember 2003

Mengetahui/Mengesahkan
a.n. Rektor
Ketua Lembaga Penelitian,



Prof. Dr. H. Sarmanu, M.S.
NIP 130 701 125

RINGKASAN

POLITIK TUBUH DAN SENSUALITAS PEREMPUAN: DISKURSUS MEDIA TERHADAP FENOMENA GOYANG PENYANYI DANGDUT PEREMPUAN (Yuyun W.I Surya, Rachmah Ida, 2003, 65 halaman)

Persoalan politik tubuh (*politics of body*) dan konsepsi sensualitas perempuan di tanah air terbuka dalam diskusi publik, sebuah fenomena yang pada jaman Orde Baru tidak mungkin terjadi. Jika selama ini wacana atas keduanya seolah tersembunyi dan ditabukan, kontroversialisasi Inul dan pegoyang dangdut perempuan lainnya di Indonesia telah memberikan jalan akan keterbukaan diskursus publik terhadap persoalan pornografi, sensualitas, dan perdebatan atas politik tubuh perempuan.

Studi yang dilakukan ini mengeksplorasi sekaligus menganalisis wacana publik di media massa. Riset yang dilakukan terbatas pada tema analisis tekstual media. Analisis tekstual dilakukan dengan memetakan dan mengidentifikasi isu-isu yang muncul berkaitan dengan persoalan politik tubuh perempuan dan sensualitas yang berkembang dimasyarakat, melalui tekstualisasi isi pemberitaan media massa dalam konteks seputar isu kontroversial penyanyi dangdut Inul Daratista yang baru-baru ini terjadi di tanah air.

Dari proses ini dihasilkan apa dan bagaimana konsepsi sensualitas di Indonesia didefinisikan dan diperdebatkan oleh para aktifis, tokoh masyarakat, publik, dan pejabat negara. Selebihnya bisa juga dilihat formasi identitas perempuan dalam konteks ini dikonstruksikan dan direpresentasikan serta didistribusi oleh media massa. Bagaimana negara, masyarakat dan media membingkai konsepsi politik tubuh perempuan dalam kaitannya dengan isu goyangan para penyanyi dangdut perempuan di tanah air? Pembacaan atas realitas atau fenomena tersebut dilakukan dengan perspektif studi-studi media dan budaya (*media and cultural studies perspective*).

Isu kontroversial yang berada di seputar perdebatan pro dan kontra terhadap fenomena goyang tubuh penyanyi dangdut perempuan, tidak saja terbatas pada persoalan boleh-tidaknya penyanyi dangdut bergoyang energik dan melakukan improvisasinya dipanggung, tetapi merambah pada persoalan hak asasi perempuan dan isu kekeleasan terhadap perempuan. Definisi atas konsep sensualitas dan politik tubuh perempuan yang berkembang di media massa tidak berhasil dirumuskan dalam definisi yang jelas. Akan halnya sensualitas, diskursus yang berkembang menyatakan sebagai bentuk aksi sensual yang sengaja dipertontonkan untuk mengundang imajinasi seksual yang mengkonsumsi. Pakaian minim, terawang, dan terbuka adalah salah satu contoh bentuk sensualitas itu. Namun yang menarik, selama aksi sensual itu tidak membangkitkan selera seksual, maka selama itu pula tidak termasuk dalam kategori erotis apalagi porno.

Sensualitas adalah "virus" yang melekat pada perempuan dan menyebabkan wabah kerusakan mental dan moral bangsa. Tubuh perempuan tidak dilihat secara utuh melainkan menjadi potongan-potongan tubuh yang dilihat sebagai penyebab dalam konteks penurunan iman dan mental bangsa. Agen-agen yang berperan sebagai *barier* yang menghalangi perempuan untuk mengekspresikan dan mengaktualisasikan diri dalam public sphere ternyata dalam bentuk komunalitas-komunalitas eksklusif yang kebanyakan berpijak atau berbasis pada kelompok-kelompok keagamaan (terutama Islam). Kalaupun mereka individu, tapi mengatasnamakan umat, masyarakat, komunitas Islam, dan sebagainya. Institusi inilah yang dalam rumusan Foucault (1979) disebut sebagai



'disciplinary practices' yang dengan *power* atau kekuatannya membentuk dan mengkonstruksi tubuh perempuan.

Batasan pornografi bahkan relatif dan seperti karet. Tergantung pada pemaknaan, persepsi, dan pikiran konsumen penikmat adegan atau aksi sensual di atas. Sesuatu dikatakan dalam kategori pornografi, ketika yang mempersepsi atau yang berimajinasi terangsang *sexual desire*-nya oleh aksi tersebut. "Berpikir ngeres", "jelek", "tidak beres otaknya", adalah istilah yang merujuk pada terjadinya pornografi. Media massa tak kalah pentingnya menjadi institusi represif atas tubuh perempuan, sekaligus pihak yang mengeksploitasi tubuh perempuan untuk kepentingan ekonomik kapitalis. Media berperan dalam mengangkat obyek-obyek budaya ke permukaan, tetapi dengan kekuatannya itulah media juga menggunakan untuk kepentingan sepihak. Eksploitasi atas tubuh perempuan pada gilirannya tidak memperbaiki pencitraan atas eksistensi perempuan, melainkan mengkonstruksi representasi negatif atas model-model perempuan yang ada sebagai komoditi ekonomi media.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur, akhirnya penelitian Politik Tubuh dan Sensualitas Perempuan: Diskursus Media Terhadap Fenomena Goyang Penyanyi Dangdut Perempuan dapat terselesaikan dengan baik. Untuk itu peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga selesainya penelitian ini.

Ucapan terima kasih terutama kami sampaikan kepada Lembaga Penelitian Universitas Airlangga yang telah memberikan kesempatan dan dana kepada peneliti untuk mengadakan observasi di lapangan hingga penyelesaian penulisan laporan penelitian ini.

Karya ini masih jauh dari sempurna. Sehingga kekurangan yang ada di dalamnya, membuka peluang bagi siapapun untuk memberikan masukan dan kritik untuk lebih menyempurnakan dan memperbaiki karya ini lebih lanjut.

Akhirnya, harapan peneliti semoga laporan ini bisa menjadi masukan dan bahan kajian bagi siapapun yang memiliki perhatian terhadap permasalahan perempuan dan media serta komunikasi.

Surabaya, 5 Desember 2003

DAFTAR ISI

	LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN	ii
	RINGKASAN DAN SUMMARY	iii
	KATA PENGANTAR	iv
I.	PENDAHULUAN	
I.1.	Latar Belakang Permasalahan	1
I.2.	Rumusan Masalah	5
II.	TINJAUAN KEPUSTAKAAN	
II.1.	Media dan <i>Cultural Studies</i>	7
II.2.	Tubuh Perempuan dan Diskursus Politik Tubuh	9
II.3.	Ekonomi Politik Media	14
II.4.	Perempuan dan Media	15
III.	TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	
III.1.	Tujuan Penelitian	19
III.2.	Manfaat Penelitian	20
IV.	METODE PENELITIAN	
IV.1.	Tipe Penelitian	21
IV.2.	Unit Analisis	22
IV.3.	Populasi dan Sampel	22
IV.4.	Analisis Data	23
V.	HASIL DAN PEMBAHASAN	
V.1.	Persoalan Sensualitas dan Goyang Tubuh Perempuan di Media Massa	
	V.1.1. Perempuan dalam Media	27
V.2.	Definisi atas Konsep Sensualitas dan Politik Tubuh perempuan di Media Massa	
	V.2.1. Goyang Tubuh: antara Hak Perempuan, Kebebasan Berekspresi dan Kekerasan Perempuan	32
V.3.	Wacana Politik Tubuh (Perempuan) di Indonesia	35
V.4.	Isu yang Terlibat dalam Proses Artikulasi dan Pendefinisian Konsep Sensualitas dan Goyang Tubuh Perempuan di Indonesia	
	V.4.1. Sensualitas Perempuan, Erotisme, dan Pornografi	44
	V.4.2. Global-Local dalam Wacana Erotisme dan Moral Bangsa	53
VI.	KESIMPULAN DAN SARAN	
VI.1.	Kesimpulan	59
VI.2.	Saran	63
	DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Merebaknya fenomena Inul Daratista, penyanyi dangdut perempuan yang menyebabkan berkembangnya isu kontroversial di tanah air menarik untuk di analisis. Persoalannya tidak lagi pada fenomena goyang tubuhnya dalam setiap *show* yang dilakukannya dan larangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap aksi panggungnya yang terkenal dengan sebutan goyang “*ngebor*”. Bahkan fenomena yang baru saja terjadi dalam perseteruan antara Inu dan beberapa penyanyi perempuan dengan penyanyi dangdut legendaries Haji Rhoma Irama dan para penyanyi senior dangdut Indonesia, menjadi polemik menarik untuk melihat bagaimana musik, terutama dangdut, dan kekuatan kelompok-kelompok tertentu telah melakukan penekanan satu sama lain.

Yang menarik, belajar dari kasus di atas adalah persoalan politik tubuh (*politics of body*) dan konsepsi sensualitas perempuan di tanah air terbuka dalam diskusi publik, sebuah fenomena yang pada jaman Orde Baru tidak mungkin terjadi. Jika selama ini wacana atas keduanya seolah tersembunyi dan ditabukan, kontroversialisasi Inul dan pegoyang dangdut perempuan lainnya di Indonesia telah memberikan jalan akan keterbukaan diskursus publik terhadap persoalan pornografi, sensualitas, dan perdebatan atas politik tubuh perempuan. Namun agaknya diskusi publik yang beredar mengarah pada bias gender. Bahkan hal yang menyedihkan, beberapa komentar (terutama kaum pria) terhadap fenomena goyang dangdut para penyanyi perempuan di tanah air seolah melecehkan, seperti misalnya, “apa yang

diributkan kalo perempuan di berikan kemampuan dan bodi/tubuh untuk bergoyang". Dan masih banyak lagi komentar senada.

Dalam perkembangan wacana media massa, representasi politik tubuh perempuan belum pernah dipahami dan diperdebatkan baik oleh kaum feminis di tanah air maupun para aktifis perempuan sendiri. Fokus perhatian pada tindakan kekerasan terhadap perempuan lebih mengedepan daripada menyibak persoalan politik identitas dan tubuh perempuan. Persoalannya bukan karena kaum feminis dan aktifis perempuan di tanah air tidak memperhatikan persoalan ini, tetapi karena problem terbesar yang dialami oleh kaum perempuan di Indonesia saat ini, salah satunya, adalah aksi kekerasan. Sehingga isu yang berkaitan dengan pelarangan MUI terhadap aksi goyang Inul pun diarahkan pada kontekstualisasi kekerasan terhadap perempuan.

Media massa mempunyai peran besar dalam pembentukan dan distribusi representasi stereotype perempuan yang tidak pernah menguntungkan diri perempuan. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap pembentukan image tentang identitas perempuan. Media massa dengan kekuatan ideologisnya dan *coverage* atau peliputannya mampu menyebarkan pesan dalam waktu yang sesaat. Seringnya atau besar kecilnya isu yang diliput oleh media, lambat laun berpengaruh terhadap persepsi khalayak akan isu tersebut.

Persoalan politik tubuh telah banyak diangkat oleh kaum feminis Barat untuk melihat bagaimana posisi perempuan dan identitasnya dalam masyarakat. Penciptaan gambaran tentang stereotip tubuh perempuan, pada akhirnya membiaskan jati diri dan keberadaan perempuan dimasyarakat, menjadi bahan bualan laki-laki, misalnya (Freidan, 1985). Dalam pandangan Betty Freidan (1985) tubuh biologis perempuan yang terbagi-bagi seperti rambut, pinggul, dada, dan wajah adalah artefak-artefak

yang selalu dikonstruksi untuk tujuan-tujuan menjadikan perempuan sebagai obyek seksual yang pada akhirnya menempatkan perempuan dalam posisi tidak menguntungkan.

Fenomena goyang Inul dan artis dangdut lainnya di media massa Indonesia, sebagian besarnya mengarah pada diskusi persoalan sensualitas bahkan pornografi. Hal ini menimbulkan berkembangnya wacana atas konsepsi sensualitas perempuan di tanah air. Sebenarnya bagaimana konsepsi sensualitas dan/atau pornografi itu sendiri, baik yang berkembang dari dan di masyarakat Indonesia dan yang dihasilkan atau dikonstruksi oleh media massa. Konsepsi sensualitas dan pornografi sendiri selama ini seolah mengarah pada pensifatan perempuan yang diaanggap menggoda nafsu dan birahi laki-laki, termasuk goyang pinggul yang dilakukan oleh artis-artis penyanyi dangdut yang ada. Inilah yang terjadi, goyang pinggul diidentikkan dengan sensualitas bahkan identik dengan erotisme, karena masuk dalam kelompok erotis, maka hal ini dikategorikan porno: sebuah analogi dan logika akal-akalan yang menyederhanakan atau menggeneralisir fenomena berbeda dalam satu atap kontekstualisasi!.

Eksistensi perempuan dalam séjarah berkebangsaan dan bernegara di Indonesia tidak pernah mendapatkan posisi yang menguntungkan. Perempuan ditempatkan oleh negara dalam peran-peran sekunder, dan menempatkan laki-laki dalam kapasitas dominasi terutama pada domain-domain public sphere. Ruang publik telah dikuasai oleh nilai-nilai patriarki dan maskulinitas. Ketika perempuan mencoba masuk dalam ranah publik—seperti yang dilakukan oleh para penyanyi dangdut wanita ini—penolakan terhadap eksistensi perempuan terjadi kembali. Ranah publik yang dikuasai sebagian besarnya oleh laki-laki seolah terancam oleh kemajuan dan perjuangan perempuan untuk bisa juga muncul di permukaan publik. Lebih daripada

itu sebenarnya, pemunculan isu-isu femininitas diartikulasikan dalam konteks pendegradasian identitas perempuan.

Dunia selebritis dan hiburan di tanah air selalu tidak lepas dari kungkungan cultural, politik, dan religiusitas. Artis atau selebritis Indonesia, terutama kaum perempuannya, selalu dituntut sekaligus dikungkung oleh limitasi atau pembatasan “aturan-aturan” baik yang bersifat politis maupun religius. Kedua limitasi inilah yang harus pandai-pandai dimainkan oleh pelaku dunia hiburan di tanah air. Seorang artis perempuan, misalnya, selain harus terlihat seksi, cantik, dan menarik, dia harus juga menunjukkan ketaatannya pada agama (Islam, terutama). Sehingga politik dan agama seolah selalu berbenturan dengan penampilan, atau yang lebih besar lagi, identitas perempuan. Bukan saja negara yang turut masuk dalam menentukan dan mendefinisikan identitas perempuan, tetapi kelompok-kelompok masyarakat di tanah air turut pula mempengaruhi pembentukan identitas ini, sementara media massa Indonesia—yang masih bisa dikategorikan sebagai apparatus negara, walau kebebasan pers atau media dideklarasikan—mempertegas konstruksi atas identitas perempuan. Persoalan yang rumit akhirnya, membatasi ruang gerak perempuan dalam ranah publik ini.

Dalam kaitan inilah studi yang dilakukan ini mencoba mengeksplorasi sekaligus menganalisis wacana publik yang beredar di media massa. Masih kurangnya riset yang dilakukan dan penyediaan hasil-hasil penelitian terhadap persoalan politik tubuh dan identitas perempuan di tanah air, mendorong peneliti untuk mengangkat persoalan ini sebagai topik penelitian kali ini. Namun demikian riset yang dilakukan saat ini terbatas pada tema analisis tekstual media. Analisis tekstual dilakukan dengan memetakan dan mengidentifikasi isu-isu yang muncul berkaitan dengan persoalan politik tubuh perempuan dan sensualitas yang berkembang dimasyarakat, melalui

tekstualisasi isi pemberitaan media massa dalam konteks seputar isu kontroversial penyanyi dangdut Inul Daratista yang baru-baru ini terjadi di tanah air. Dari proses ini nantinya akan bisa dihasilkan apa dan bagaimana konsepsi sensualitas di Indonesia didefinisikan dan diperdebatkan oleh para aktifis, tokoh masyarakat, publik, dan pejabat negara. Selebihnya bisa juga dilihat bagaimana formasi identitas perempuan dalam konteks ini dikonstruksikan dan direpresentasi serta didistribusi oleh media massa di tanah air. Bagaimana negara, masyarakat dan media membingkai konsepsi politik tubuh perempuan dalam kaitannya dengan isu goyangan para penyanyi dangdut perempuan di tanah air. Pembacaan atas realitas atau fenomena tersebut akan dilakukan dalam kerangka perspektif studi-studi media dan budaya (*media and cultural studies perspective*).

1.2. Rumusan Masalah :

1. Apasajakah isu-isu yang muncul di media massa berkaitan dengan persoalan sensualitas perempuan dan goyang tubuh perempuan?
2. Apa definisi atas konsep sensualitas dan politik tubuh perempuan yang berkembang dari sumber media massa di Indonesia?
3. Bagaimana konsepsi sensualitas dan politik tubuh perempuan diartikulasikan dan dimaknai sebagai wacana gender di tanah air?
4. Isu-isu apasajakah yang terlibat dalam proses artikulasi dan pendefinisian konsep sensualitas dan goyang tubuh perempuan di Indonesia?

BAB II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Dalam wacana akademik di tanah air, studi-studi media dan representasi perempuan telah banyak dilakukan. Namun sayangnya, analisis dan diskusi terhadap temuan datanya mempunyai tendensi yang mengarah kepada pembacaan yang lebih sosiologis, psikologis, atau bahkan antropologis. Kekhasan untuk melihat bagaimana power media membentuk dan mengkonstruksi pesan dan symbol dalam produksinya, lupa untuk dimasukkan dan dipertimbangkan dalam diskusi studi-studi tersebut.

Studi yang dilakukan ini mengeksplorasi teks-teks media untuk membaca, mengungkap dan men-dekonstruksi pemaknaan sebuah realitas yang berkaitan dengan isu politik tubuh dan sensualitas perempuan yang di frame dalam konteks isu goyang penyanyi dangdut Indonesia. Untuk mencapai tujuan ini, maka beberapa teori dan studi-studi yang pernah dilakukan dalam konteks *media studies* dan *gender mainstreaming*, maka tinjauan pustaka ini disusun dengan pertama menjelaskan secara singkat konsepsi, definisi dan perkembangan studi media dan budaya (*Media and Cultural Studies*) yang berkembang di Eropah, kemudian bagaimana perspektif ekonomi politik media melihat peran media dalam proses produksi dan distribusi pesan, dan di bagian berikutnya khusus menyajikan teori tentang politik tubuh dalam konteks *Cultural Studies*. Selanjutnya lebih spesifik lagi, beberapa kajian pustaka tentang perempuan dan media massa, serta mempersempit persoalan pada realitas di tanah air dengan menganalisis studi-studi yang pernah dilakukan terhadap representasi perempuan dalam media massa.

II.1. Media dan *Cultural Studies*

Dalam berbagai tulisan tentang akar studi media (*Media studies*) banyak sekali ditemukan dalam pustaka yang berkaitan dengan studi-studi budaya (*Cultural studies*) yang berkembang pada awalnya di Departemen *British Cultural Studies* di London Eropah. Tulisan yang sering dikutip adalah salah satunya produksi Stuart Hall (1972), direktur dari pusat kajian studi-studi budaya pada *British Cultural studies school*.

Asumsi dasar tentang studi Media sebagai salah satu bagian dari studi-studi budaya ini, Stuart Hall (1972) menyebutkan bahwa: "Media sebagai kekuatan kultural dan ideologis utama, berdiri dalam posisi dominan dengan memperhatikan cara dimana hubungan-hubungan sosial dan persoalan-persoalan politik didefinisikan dan produksi dan transformasi dari ideologi-ideologi populer yang ada di audiens dipertimbangkan".

Menurut Hall (1972) studi Media dan Budaya (terutama pengaruh faktor-faktor sosial dan budaya) mempunyai *concern* atau perhatian terhadap : *pertama*, studi Media dan budaya menolak asumsi '*direct influence*' atau pengaruh langsung media kepada khalayak dan lebih mengutamakan anggapan 'pengaruh langsung media' itu dalam konteks 'peran ideologis media' (*the ideological role of the media*). *Kedua*, studi-studi Media dan Budaya lebih menekankan pada aspek strukturasi kebahasaan dan ideologikal (*linguistic and ideological structuration*). *Ketiga*, studi Media dan Budaya melihat konsep aktif audiens terhadap 'pembacaan' isi media dan terhadap hubungan antara bagaimana pesan media di-encoding atau dibuat, suasana teks yang di-encoding atau diproduksi waktu itu, dan variasi audiens menterjemahkan atau men-dekoding pesan media (*active concept of audience, of 'reading' and of the relation between how media message encoded, the moment of the encoded text, the variation of audience 'decoding'*). *Keempat*, peran yang dimainkan media ada dalam



sirkulasi dan mengamankan definisi-definisi dan representasi ideologi dominan (*the role which the media play in the circulation & securing of dominant ideological definitions and representations*).

Studi-studi Media dan Budaya tidak terlalu mengekang dirinya dalam batasan teori atau pendirian ideologis yang bersifat terlalu 'orthodoxy'. Dengan kata lain, studi Media dan Budaya tidak membatasi diri dalam kerangka teori atau konseptualisasi yang tunggal, seperti halnya yang dilakukan oleh studi-studi empirisme dan positivistik. Bahkan studi Media dan Budaya mendorong pertumbuhan dan kajian kritis atas teori atau *ideological stand* yang sudah ada. Hanya saja, mainstream studi Media dan Budaya lebih banyak menggunakan ide-ide Marxism sebagai referensi (*reference point*), tetapi sifatnya terbuka (*open Marxism*) dengan melihat fenomena dari kacamata determinisme ekonomi dan determinisme ideologi (*economic determinism and ideological determinism*).

Area atau topik utama yang banyak diperhatikan oleh studi Media dan Budaya ini antara lain: kajian terhadap ideologi, tekstual, 'pembacaan' audiens. Atau dengan kata lain, area utama kajian studi Media dan Budaya adalah: produksi media (*media production*), analisis tekstual (*textual analysis*), analisis audiens dalam konteks aktifitas interpretative atau penggunaan/konsumsi media (*interpretive/utilitarian activities [audience]*). Kata kunci, atau hal yang diamati lebih spesifik pada isu-isu: representasi, dekonstruksi, encoding/decoding pesan-pesan media.

Pada awalnya studi-studi Media dan Budaya ini perkembangannya di motori oleh beberapa studi atau kajian yang lebih banyak menekankan pada pertumbuhan studi kode-kode budaya dan struktur kebahasaan (*Cultural code and practices in structural linguistic* by Claude Levi-Strauss) dan *semiotic* (Roland Barthes), studi-studi ideologikal (Althusserian dan Marxism), kajian diskursus praktis tentang

ideologi dan realitas sosial (*discursive practices: ideology & social reality*) (Michel Foucault), kemudian berkembang pada kajian psikoanalisis tentang subyektifitas dan budaya (*subjectivity and culture*) (Lacanian Psychoanalysis), dan perkembangan terakhir pada kajian-kajian feminisme (Judith Butler, Janice Radway, dan Liesbet Van Zoonen).

Konstruk atau konsepsi yang dipakai dalam kajian studi Media dan Budaya sebagian besarnya adalah konsepsi '*hegemony*' (Antonio Gramsci), yang melihat budaya dan ideologi di tempatkan dalam hubungannya dengan proses ekonomi, kelas sosial dan memfokuskan pada proses pengaruh ideologis, kekhususan sejarah/historisasi, konsep tentang kekuatan sosial yang dinamis dan terbuka. Lebih khususnya lagi, studi Media dan Budaya melihat isu-isu makro dalam teori komunikasi seperti politik, ekonomi, ideologis, dan faktor-faktor budaya yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari (*everyday life*) dalam wacana proses-proses komunikasi keseharian pada kondisi-kondisi sosial makro untuk menunjukkan bagaimana konstruksi budaya diberlakukan dan dibatasi dalam kondisi-kondisi strukturak yang lebih spesifik. Karena itu teks dan konteks amatlah menentukan untuk dianalisis, terutama dalam proses konsumsi media sehari-hari.

II.2. Tubuh Perempuan dan Diskursus Politik Tubuh

Sepanjang sejarah, ide-ide tentang tubuh-tubuh perempuan (*women's bodies*) telah memberikan peran dramatis untuk mendorong or menekankan hubungan kekuasaan (*power relationship*) antara laki-laki dan perempuan (Weitz, 2000). Kajian-kajian atas tubuh perempuan—yang lebih banyak berkembang di Barat—selalu berhubungan dengan konteks bahasa hukum. Secara tipikal hukum telah mendefinisikan tubuh-tubuh perempuan sebagai properti laki-laki (*men's property*).

berhubungan dengan konteks bahasa hukum. Secara tipikal hukum telah mendefinisikan tubuh-tubuh perempuan sebagai properti laki-laki (*men's property*). Pada masyarakat kuno bahkan, perempuan yang tidak menjadi budak tipikal menjadi milik ayah-ayah mereka sebelum menikah dan menjadi milik suami-suami setelahnya. Dengan alasan ini, hukum *Babylonian*, misalnya, memperlakukan perkosaan sebagai sebuah bentuk properti rusak, yang menghukum para pemerkosa untuk membayar denda kepada suami atau ayah dari perempuan yang diperkosa, tetapi tidak pada perempuannya sendiri (Weitz, 2000: 3). Sama halnya perkawinan, pada masyarakat kuno, tipikal perempuan seolah "dikontrakkan" oleh ayahnya kepada calon suami atau calon mertuanya dengan peran perempuan yang sangat kecil dalam proses penawaran "kontrak" itu.

Status legal perempuan sebagai properti merefleksikan kepercayaan bahwa tubuh-tubuh perempuan secara berkesinambungan berbeda dari tubuh-tubuh laki-laki yang kemudian membuat pemahaman tentang konsepsi perempuan menjadi rentan dan berbahaya. Dalam kajian feminis yang dilakukan oleh Julia Kristeva (1974) untuk mengupas diskursus politik tubuh perempuan adalah dengan "membaca" struktur kebahasaan (semiotik) beberapa puisi dalam kerangka hukum laki-laki (*paternal law*) dari perspektif Lacanian, yang sekaligus di kritiknya. Kristeva dalam kajian linguistiknya membedah konsepsi *maternal body* (tubuh keperempuanan) dengan perspektif feminisme sebagai pembedaan konsep perempuan dan laki-laki dalam hukum paternal itu. Kristeva mencoba untuk mengkritik pendekatan yang dilakukan *Lacanian narrative* yang berasumsi bahwa makna kultural memerlukan represi atau penekanan utamanya pada hubungan terhadap *maternal body* tersebut. Menurut Kristeva, bahwa "semiotic" adalah dimensi bahasa yang dibentuk atau disesuaikan oleh utamanya *maternal body* itu, yang tidak hanya melemahkan premis utama Lacan.

tetapi memberikan sumber penting tentang subversi diantara simbolisme linguistik (dalam Butler 1999: 101-2).

Dalam tulisannya yang berjudul *Desire in Language* (1977), Julia Kristeva menggali definisinya sendiri tentang semiotik lebih pada terminologi psikoanalisis. Dorongan-dorongan utama yang ditekankan oleh struktur hukum paternal (yang disebut dengan istilah "the Symbolic") pada bahasa narasi yang ditelitinya, semiotik ternyata mengindikasikan apa yang dipahaminya sebagai dorongan keperempuanan (*maternal drives*), dorongan ini bukan hanya milik ibu (perempuan), melainkan milik mereka yang mempunyai karakteristik ketergantungan terhadap tubuh bayi (*infant's body*) baik perempuan maupun laki-laki, pada ibunya. Dengan kata lain, "the maternal body" (tubuh perempuan) mendesain hubungan yang berkelanjutan daripada keterpisahan subyek atau obyek keinginan (*desire*). Sementara "the Symbolic" (yakni struktur hukum paternal) ditujukan untuk menolak konsepsi ibu, semiotik sendiri melalui ritme, asonansi, intonasi, permainan suara, dan repetisi atau pengulangan merepresentasikan atau memperbaiki tubuh perempuan (*maternal body*) dalam ujaran puitis. Dengan pemahaman kajian linguistik antara "the Symbolic" sebagai hukum laki-laki (*paternal law*) dan "semiotic" sebagai tubuh perempuan (*maternal body*), Kristeva menyediakan kerangka dasar bagaimana formasi politik tubuh perempuan dan perbedaan jenis kelamin perempuan dan laki-laki yang dikaitkan dengan hubungan kekuasaan dalam lingkup linguistik tadi.

Foucault barangkali yang lebih dalam lagi mengungkap perbedaan subyek dan obyek berbeda jenis kelamin laki-laki dan perempuan dalam konteks politik tubuh melalui serangkaian tulisannya yang berjudul *the History of Sexuality*. Dalam bukunya itu, terutama pada volume 1, Foucault menjelaskan bagaimana konstruksi perbedaan jenis kelamin dan mendekonstruksi terminologi perbedaan jenis kelamin.

melalui pembacaannya terhadap tokoh Herculine Babin, yang kemudian memberikan gambaran bagaimana terminologi *'sex'* dan *'sexuality'* sebenarnya berbeda. Bagi Foucault, terminologi *'sex'* bukanlah sebuah wujud yang terbentuk dari hubungan sebab-akibat, bukan sesuatu yang origin atau demikian adanya. Sementara terminologi *'sexuality'* lebih kompleks dan terbuka sebagai akibat dari relasi kekuasaan. Sehingga perbedaan jenis kelamin laki-laki dan perempuan, yang pada akhirnya menempatkan perempuan dan tubuhnya dalam diskursus ketertindasan atau eksploitasi terhadapnya, adalah dikonstruksi secara historis dalam relasi kekuasaan tadi, terutama dengan adanya aturan hukum. Bagi Foucault, tubuh manusia sebenarnya sama, tidak berbeda, namun persoalan hukum telah membuat perbedaan sehingga identitas yang terbentuk, dalam kaitannya dengan perbedaan jenis kelamin, dengan jelas-jelas membelah identitas perempuan dan laki-laki menjadi berbeda.

Gerakan para feminis liberal di pertengahan tahun 1960an, menetapkan tujuannya untuk mencapai ekualitas atau kesejajaran dengan laki-laki dalam struktur sosial yang ada, misalnya dengan mulai menyuarakan kepentingan bahwa tanggung jawab menjaga anak adalah tanggung jawab laki-laki juga. Dalam perkembangannya, para feminis liberal ini ternyata dihadapkan pada kesulitan apakah dengan menekankan perlunya laki-laki terlibat dalam penataan sosial (*social arrangement*) ini akan membantu perempuan? Atau menjadikan perempuan lebih baik atau lebih manusiawi? Pertanyaan-pertanyaan ini diiringi dengan pertanyaan adanya dikotomi perbedaan antara *'male'* (laki-laki) dan *'female'* (perempuan) dalam realitas perbedaan jenis kelamin (Weitz, 2000).

Berbeda dengan aliran ini, gerakan yang menyebut dirinya sebagai "cultural feminism", telah menekankan kembali pentingnya perbedaan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Cultural feminists berpendapat bahwa tubuh-tubuh perempuan



(women's bodies) --begitu pula otak mereka dan nilai-nilai moralnya—sebenarnya superior dibandingkan laki-laki (Weitz, 2000: 8). Menurut perspektif ini kemampuan perempuan untuk menghasilkan kehidupan manusia, membuat perempuan (khususnya ibu) lebih pasif, menyayangi, moral, kreatif dan menghargai hidup dibandingkan laki-laki. Bahkan perempuan punya hubungan yang lebih dalam daripada pria terhadap alam dan ekologi.

Sementara itu gerakan feminis modern telah melakukan tekanan terhadap pandangan-pandangan tradisional akan tubuh perempuan. Feminis modern menekankan gerakannya lebih pada : (1) upaya mengurangi tekanan yang meningkat terhadap perempuan untuk mengontrol bentuk tubuhnya; (2) kelompok ini berupaya untuk mendefinisikan kondisi pre-menstruasi dan *post-menopausal* pada diri perempuan sebagai penyakit; (3) mendukung gerakan anti-aborsi dan hak hidup jabang bayi (*fetal rights*).

Sepanjang sejarahnya, perempuan mengalami tekanan sosial untuk mempertahankan penampilannya yang bisa diterima publik. Dalam penelitiannya, Wiseman (1992) dan kawan-kawan (dalam Butler, 2000: 9) menemukan bahwa berat tubuh para wanita pemenang *Miss America* dan *Miss Playboy* (majalah *Playboy*, red) mengalami penurunan rata-rata berat tubuhnya, namun dari segi tinggi badan, trennya mengalami kenaikan. Sehingga dengan kata lain, perempuan yang menjadi pemenang kontes-kontes itu lebih bertambah kurus, namun mereka lebih tinggi-tinggi postur tubuhnya. Belum lagi persoalan PMS (*pre menstrual syndrome*) yang menempatkan perempuan pada posisi yang tidak menguntungkan. Karena adanya PMS ini perempuan selalu dianggap lemah daripada laki-laki akibat emosional efek yang ditimbulkan oleh PMS ini.

Kesimpulannya, sepanjang sejarah pula ide-ide tentang tubuh perempuan telah mempengaruhi stigma diri perempuan. Dengan melihat bagaimana pengalaman-pengalaman perempuan sendiri dan kondisi yang dikonstruksi secara sosial, maka akan diperoleh pemahaman tentang kehidupan perempuan, posisi perempuan dalam masyarakat dan kemungkinan-kemungkinan resistensi perempuan melawan dominasi posisi patriarki.

II.3. Ekonomi Politik Media

Diskusi publik yang berkembang dalam fenomena konflik pro-kontra goyangan para penyanyi dangdut perempuan semakin mengarah kepada persoalan "politik". Artinya berbagai kepentingan baik mereka yang mempunyai kekuatan seperti kelompok-kelompok komunitas yang ada dalam masyarakat dan kekuasaan misalnya para produser, pemilik media, dan mereka yang tergabung dalam industri musik turut terlibat dalam perseteruan isu ini. Dalam konteks ini, permasalahan ini menyiratkan bahwa situasi ekonomi politik selalu berpengaruh dalam proses produksi dan distribusi dalam industri *popular culture* atau industri budaya (Mosco, 1996).

Dalam konteks ekonomi politik industri media, ada tiga kekuatan besar yang relasinya saling bertautan. Mereka adalah para pemilik media, para produser, dan pengiklan tentu saja (Mosco, 1996). Disamping ketiga kekuatan besar ini, ada lagi tiga komponen lembaga ekonomik dan politik yang mempunyai akses besar kepada media, mereka antara lain: pemerintah dan elite bisnis, produser program yang menentukan proses produksi program media, dan pengiklan yang berkepentingan dengan target pasar (*audience*).

Industri komunikasi telah memproduksi komoditas tidak saja dalam bentuk material atau bentuk barang, tetapi juga 'sesuatu' yang lain, yang biasa dilihat sebagai komoditas politik disamping kepentingannya ekonominya (Murdock, 1982). Dengan

dalih kepentingan ekonomik inilah, pesan media atau lebih tepatnya produk media diproduksi dan didistribusikan kepada khalayak hanya sebagai perantara yang kemudian "menjual" khalayak media kepada pengiklan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan sepihak para kapitalis media ini. Sama halnya dengan barang, berita atau isu yang berkembang dalam masyarakat dikemas dalam bungkus media dan ditawarkan sebagai komoditi untuk mendapatkan keuntungan atau bersifat profitable, bagi keuntungan media. Industri media, seperti saat ini di Indonesia, telah memasuki tahapan yang lebih maju. Namun paradigmanya tidak berubah, konglomerasi media dan keinginan media untuk menumpuk keuntungan besar, menyebabkan media untuk melakukan apa saja yang laku dijual di masyarakat, termasuk dalam persoalan ini, Inul dan para penyanyi dangdut, goyannya, dan kontroversi isunya. Sadar ataupun tidak, media telah melancarkan power-nya untuk tujuan keuntungan media daripada perbaikan citra perempuan itu sendiri.

Penjelasan tentang ekonomi politik media di atas, mempunyai signifikansi teoritis untuk menjelaskan bagaimana representasi-representasi realitas sosial yang ada di media adalah hasil konstruksi dan manipulasi oleh unsur-unsur yang terlibat di atas. Dalam kaitan ini, penelitian yang dilakukan ingin melihat bagaimana unsur-unsur ekonomi politik media terlibat dalam persoalan representasi politik tubuh perempuan dan persoalan sensualitas perempuan di media massa. Lebih daripada itu penelitian ini merupakan sebuah *breakthrough* atau terobosan dalam konteks media dan gender yang selama ini masih minim atau bahkan cenderung belum ada dalam menganalisis dan mengeksplorasi isu identitas dan perempuan terutama dalam fokus politik tubuh dan sensualitas yang menjadi bagian dari kajian *Gender Studies* (studi studi gender).

II.4. Perempuan dan Media

Beberapa aktivis feminis di Barat mulai menggunakan analisis isi media untuk mendeskripsikan keberadaan perempuan di media (Brown, 1990). Para peneliti studi feminis dalam kajian studi-studi kultural mengeksplorasi keberadaan gambaran dan citra perempuan di media dalam sosok representasinya.

Keadaan masyarakat menempatkan posisi perempuan dalam konteks domestifikasi sedikit banyak dipengaruhi oleh pemaknaan atas tubuh perempuan (Freidan, 1985). Mulai dari ujung dan seluruh tubuh perempuan dimaknai dalam konteks yang miring, yang akhirnya berpengaruh dalam pembentukan konstruksi perempuan. Terminologi 'feminine' dan 'maskulin' digunakan untuk mendefinisikan konstruksi sosial perempuan dan laki-laki sebagai oposisi biologis yang esensial, alamiah dan diwariskan dari properti perempuan dan laki-laki (Brown, 1990). Perbedaan pensifatan biologis yang bertolak belakang terhadap perempuan dikonstruksi sepanjang waktu melalui diskursus sosial masyarakat. Pensifatan atas tubuh perempuan secara biologis mengarahkan pada bentuk-bentuk perilaku dan sikap yang umumnya diadopsi perempuan begitu saja, padahal itu hasil dari konstruksi sosial dimana media turut berperan di dalamnya (Deming, 1990).

Para analis kritis media seringkali menggunakan teori hegemoni untuk menjelaskan isi media dan pengaruhnya dalam masyarakat yang kompleks. Menurut teori hegemoni, media massa memainkan peran ideologikal dalam masyarakat, meneguhkan dan mendukung pandangan dunia secara umum dan kepercayaan-kepercayaan tertentu yang membantu kestabilan posisi pemegang kekuasaan (Press, 1990).

Media massa baik elektronik maupun cetak memainkan peran krusialnya dalam merekonstruksi identitas-identitas gender sebagai respon terhadap variasi ideologis, politis, dan sosial dalam konteks sosial kemasyarakatan. Akibat pandangan ideologis kelas menengah terhadap konsepsi perempuan, yang hanya mempunyai dua peran utama sebagai ibu dan istri, media massa pun mengikuti arus mainstream ini dan sengaja memproduksi produk-produk hiburan yang target utamanya pada perempuan. Selain itu, perempuan menjadi komoditas dua tahap bagi institusi media: pertama, perempuan yang direpresentasikan oleh media diperlakukan sebagai obyek kesenangan, dekoratif, yang dijual kepada khalayak laki-laki. Kedua, perempuan yang mengkonsumsi program media sendiri, kemudian dijual kepada pengiklan untuk mendapatkan masukan ekonomi. Eskalasi ini sudah pasti tidak pernah menempatkan perempuan dalam posisi strategis di mata institusi media.

Citra dan gambaran perempuan dalam media massa di tanah air tidak pernah menguntungkan. Studi yang dilakukan oleh Sunindyo (1996), Aripurnami (1995), Siregar (1997), dan Wardhana (2001) memperlihatkan bahwa media massa Indonesia masih menggambarkan posisi perempuan dalam stereotip tradisional bahwa perempuan lemah, tak rasional, emosional, hanya bisa menangis, rentan, dan sebagainya. Apalagi di masa Orde Baru, peran perempuan hanya digambarkan dalam dua posisi kalau tidak sebagai ibu, dia menjadi istri, tidak lebih dari itu. Walau kemajuan perempuan juga diliput dan diangkat oleh media, namun liputan semacam ini pada akhirnya mempertanyakan kembali bagaimana bila perempuan aktif dan maju, urusan keluarga siapa yang menangani? Ironis memang, walau reformasi telah bergulir, dan transisi menuju demokratisasi system yang lebih baik hendak dicapai, namun keterlibatan perempuan dalam ranah publik berikut representasinya tidak pernah berubah. Selalu disisi sebelah perempuan digambarkan maju dan modern, tapi



disisi sebelah lain memposisikan perempuan pada dilemma kodratnya dalam ranah domestik.

Dalam konteks studi ini, media massa mempunyai kesepakatan ideologis dengan nilai-nilai dominan yang berkembang dalam masyarakat. Berkaitan dengan persoalan ini, media massa agaknya telah memberikan peluang yang besar untuk mengembangkan isu persoalan goyang tubuh para penyanyi dangdut perempuan dalam konteks yang melebar dari isu yang seharusnya diamati. Diskusi-diskusi yang berkembang dalam masyarakat tentang goyang Inul misalnya, lebih berkembang mengarah pada persoalan pornografi, pornoaksi, dan yang belakangan muncul adalah sensualitas perempuan. Apa sebenarnya yang terjadi dengan tubuh perempuan dalam persoalan kontroversial ini.

o

BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

III.1. Tujuan Penelitian:

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sekaligus memetakan isu-isu yang muncul di media massa berkaitan dengan persoalan sensualitas perempuan dan goyang tubuh perempuan. Selain itu penelitian ini bermaksud mengidentifikasi definisi atas konsepsi "sensualitas", "erotisme", "pornografi", dan "politik tubuh" (*politics of body*) perempuan yang berkembang dari sumber media massa di Indonesia.

Studi ini diharapkan mampu mengeksplorasi fenomena sensualitas dan politik tubuh perempuan yang diartikulasikan dan dimaknai sebagai wacana gender di tanah air. Selain itu, studi ini dimaksudkan untuk mengungkap faktor-faktor yang terlibat dalam proses artikulasi dan pendefinisian konsep sensualitas dan goyang tubuh perempuan di Indonesia.

Akhirnya, studi yang dilakukan saat ini mencoba untuk "membaca" fenomena atau yang disebut sebagai "realitas" sosial dalam perspektive *media and cultural studies*. Seringkali isu atau pemberitaan yang diliput oleh media massa dianggap sebagai persoalan *given* atau alamiah begitu saja. Kekritisan untuk membaca dan memaknai apa yang sesungguhnya terjadi atau "fakta" dibalik peristiwa itu, masih

kurang berkembang dalam diskursus ilmiah, terutama dikalangan peneliti dan akademisi di bidang studi-studi media dan studi-studi perempuan. Oleh karena itulah, tujuan penelitian ini dilakukan dalam kaitannya untuk menyediakan "kerangka" pembacaan terhadap realitas sosial yang *mediated* atau dimediasi dengan perspektif *media and cultural studies*. Yang mana, pendekatan *media and cultural studies* ini menyediakan perangkat analisis dan metodologis ke arah pen-dekonstruksi-an atas realitas. Studi yang dilakukan saat ini diarahkan pada upaya men-dekonstruksi atas simbol-simbol media massa dalam konteks yang telah dijelaskan di atas.

III.2. Manfaat Penelitian:

Penelitian ini dimaksudkan untuk tidak hanya menguak fenomena tentang persoalan sensualitas dan politik tubuh perempuan, namun memberikan kontribusi terhadap penyediaan data-data komprehensif berkaitan dengan persoalan di atas dalam konteks sosio-kultural masyarakat Indonesia. Selain itu penelitian ini nantinya tidak hanya menyediakan data dasar untuk melihat fenomena sensualitas perempuan dan permasalahan yang muncul diseperti wacana isu ini, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap penyediaan "teknik" atau metodologi pemahaman dan pembacaan realitas sosial dalam kerangka studi media dan budaya (*media and cultural studies*). Sehingga pada akhirnya kerangka metodologis ini nantinya diharapkan mampu digunakan untuk melihat realitas yang berkembang tidak dalam kaca mata yang "normal", tetapi dalam lingkup analisis yang kritis dan utamanya melakukan dekonstruksi terhadap simbolisasi media.

BAB IV

METODE PENELITIAN

IV.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian analisis tekstual terhadap isi media massa, terutama media massa cetak seperti surat kabar, tabloid, dan majalah. Metode kualitatif isi media ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi, menggambarkan, menganalisis sekaligus mengeksplorasi isu-isu yang berkaitan dengan persoalan goyangan tubuh perempuan dan wacana sensualitas yang diliput oleh media massa Indonesia.

Penelitian analisis tekstual termasuk dalam metode analisis isi media yang bersifat kualitatif. Teks-teks hasil produk media menjadi bahan kajian dalam metode penelitian ini, namun juga konteks atau kondisi diseputar produksi teks-teks mempunyai signifikansi yang tidak mudah begitu saja diabaikan. Sehingga analisis tekstual tidak saja akan mengungkap makna eksternal atau yang tercetak-tertulis, tetapi teknik ini bisa mengungkap situasi diseputar teks yang diproduksi tadi. Dengan kata lain, analisis tekstual mempertimbangkan diskursus yang juga terjadi dalam proses produksi dan reproduksi teks media. Maka analisis tekstual selalu lebih dekat dengan konteks analisis wacana atau yang dikenal dengan *discourse analysis*.

Penelitian yang dilakukan inipun menempatkan teks bukan sebagai produk media yang begitu adanya, melainkan mencoba membaca dalam kerangka pemahaman kontekstualisasi yang ada di seputar isu atau peristiwa yang diliput oleh media. Dengan kata lain, pembacaan teks akan selalu dikaitkan dan dihubungkan dengan konteks sosial, politik, dan ekonomik dari situasi atau kondisi yang ada saat teks-teks tersebut diproduksi, sehingga pemaknaan atas teks tidak bisa tunggal tetapi *multiple*.

IV.2. Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah satuan berita dan/atau artikel media cetak yang berkaitan dengan peristiwa kontroversial seputar fenomena goyangan penyanyi dangdut Indonesia: Inul Daratista dan peristiwa-peristiwa atau isu-isu yang mengikuti atau menyertai peristiwa utama itu. Dalam kaitan ini maka satuan berita atau artikel media cetak yang dianalisis dibatasi dalam *time frame* atau kerangka waktu selama kontroversial isu goyang dangdut ini beredar di masyarakat.

IV.3. Populasi dan Sampel

Sampel data yang akan dijadikan analisis dalam penelitian ini adalah satuan berita, *feature* berita, dan artikel ulasan yang dimuat dalam berbagai media cetak baik di surat kabar, tabloid, dan majalah. Dalam analisis tekstual ini, jumlah sample berita tidak ditentukan mengingat pengambilan sampelnya dilakukan secara *purposive*. Artinya peneliti hanya memilih dan mempertimbangkan pemberitaan dan artikel yang memfokuskan atau menitik beratkan pada isu kontroversial seputar goyangan tubuh penyanyi dangdut perempuan Indonesia, tidak pada isu-isu yang membahas keberadaan para penyanyi itu dalam *frame* misalnya, profil, personal bisnis, dan

gosip-gosip para selebriti itu sendiri. Dengan demikian isu yang dianalisis benar-benar peristiwa yang berkaitan dengan persoalan sensualitas, pornografi, erotisme, dan goyangan tubuh perempuan, sehingga dengan begitu jumlah sampel tidak bisa ditetapkan kuantitasnya.

Selanjutnya, pembatasan juga dilakukan terhadap media-media cetak yang dipilih. Sehingga tahapan penelitian dilakukan sebagai berikut: pertama, menentukan media massa cetak yang akan diteliti. Kedua, memilih dan menentukan satuan berita dan artikel yang akan diteliti dengan mengecualikan berita-berita atau artikel yang tidak termasuk dalam kategori yang sudah ditetapkan diatas.

Media cetak yang di teliti adalah surat kabar *Jawa Pos* dan *Kompas*, *Tabloid Nova*, *Tabloid Citra*, *Tabloid Bintang Milenia*, dan majalah wanita *Lisa* dan *Femina*. Semua berita atau laporan liputan tentang seputar persoalan kontroversial goyang dangdut penyanyi Inul dan beberapa artis dangdut perempuan yang berkonteks para persoalan goyang tubuh dan persoalan sensualitas perempuan di Indonesia. Penentuan batas waktu media massa di atas adalah media yang terbit sejak bulan Januari hingga Juni 2003

IV.4. Analisis Data

Data yang terkumpul akan di analisis dengan teknik analisis tekstual dan uraian-uraian naratif kualitatif. Analisis tekstual memungkinkan penelitian ini karena tidak saja memberikan medium untuk mengungkap isi media melainkan mampu 'membaca' apa yang terjadi dalam realitas sosial yang ada atau wacana publik yang terjadi. Beberapa cuplikan berita media massa, termasuk komentar-komentar yang dimuat dalam pemberitaan tersebut akan juga ditampilkan dalam pemaparan hasil.



BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

Melejitnya popularitas penyanyi dangdut Inul Daratista dalam paradigma perkembangan seni dan budaya di tanah air, memunculkan beragam isu dan wacana terhadap eksistensi perempuan dalam ranah publik. Bila lebih dipersempit lagi eksistensi perempuan kali ini dipertanyakan bukan lantaran status dan perannya dalam masyarakat, tetapi lebih pada kontestasi identitas perempuan itu sendiri. Identitas (identity) adalah produk konstruksi sosial secara historis terhadap eksistensi individu. Dalam perkembangannya, identitas diseminasikan kepada individu-individu melalui kekuatan politik dan kekuasaan yang bertindak sebagai institusi otoriter yang menentukan identifikasi-identifikasi individu warga bangsanya. Dalam konteks Indonesia, negaralah yang selama ini menentukan orientasi dan identitas-identitas individu Indonesia yang ada di dalamnya (Boelstorf, 2002).

Identitas perempuan di Indonesia adalah masalah pelik yang sulit diselesaikan. Banyak variabel yang berpengaruh dalam menentukan identitas perempuan seperti negara, budaya, agama, dan norma-norma ideologis merupakan faktor signifikan dalam konteks ini. Hampir setiap detil penampilan perempuan, salah satu atau beberapa faktor-faktor tersebut ikut menilai, mengkritik, bahkan melarang apa yang dilakukan oleh perempuan Indonesia, dan hal ini yang tidak pernah terjadi terhadap laki-laki.

Kembali pada fenomena popularitas penyanyi dangdut Inul Daratista, isu yang turut berkembang meliputi peristiwa yang sesungguhnya telah jauh melenceng dari liputan peristiwa itu sendiri. Pelarangan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok

masyarakat, institusi keagamaan, dan individu-individu figur publik yang dilakukan terhadap penyanyi ini, membawa kasus ini pada isu yang lebih besar yakni perkara sensualitas perempuan, pornografi, pornoaksi, hingga jika dianalisis dalam perspektif *Media dan Cultural studies*, isu ini merambah pada kajian politik tubuh perempuan, sebagai bagian dari persoalan identitas perempuan (*women's identity*), yang barangkali belum pernah terpikir oleh para kaum perempuan bahkan para aktifis dan akademisi di Indonesia.

Persoalan politik tubuh (perempuan) sebenarnya telah menjadi diskursus lama pada kajian-kajian feminisme di dunia Barat. Kajian pada politik tubuh (perempuan) ini sebenarnya menjadi akar untuk mencari pembenaran bagaimana perbedaan (*difference*) pada diri manusia itulah yang pada akhirnya menciptakan perbedaan jenis kelamin dan perbedaan gender antara perempuan dan laki-laki. Dalam bukunya *Feminine Mystique*, Betty Friedan (1984), menjelaskan bagaimana bagian-bagian tubuh perempuan dibaca dan diinterpretasikan berbeda dengan yang dimiliki oleh laki-laki. Bagian-bagian tubuh perempuan tertentu kemudian dimitoskan dan diidentikan dengan pensifatan terhadap individu-individu perempuan. Padahal menurut Michel Foucault dalam bukunya *the History of Sexuality volume 1*, dan dalam tulisan dalam jurnal yang mengupas tentang konsepsi *Herculine Barbin*, Foucault mencoba untuk menegaskan bahwa tubuh laki-laki dan perempuan adalah sama, mengapa yang berkembang kemudian terjadi pembiasaan yang pada akhirnya membedakan identitas perempuan dan laki-laki dalam konteks masyarakat yang heteroseksual. Karena adanya perbedaan ini, sekaligus adanya campur tangan kekuasaan (*power relationship*), maka tubuh-tubuh perempuan dalam eksistensinya di masyarakat tidak pernah bisa punya otoritas pribadi, melainkan menjadi bagian penting dalam pembicaraan publik.

Media massa menjadi salah satu institusi sosial yang mempunyai peran penting dan signifikan juga dalam menentukan dan mendefinisikan status dan peran perempuan. Dalam kajian ini, media telah menjadi pihak yang tidak saja mengakomodasi munculnya berbagai opini publik dalam forum yang dibentuknya, melainkan juga menjadi penguat terhadap nilai-nilai dominan yang berkembang dalam konteks sosial politik dimana media tumbuh dan beroperasi di dalamnya. Kecenderungannya bahkan media, dengan kepentingan ekonomi-politiknya, memperkeruh situasi dan menjadikan isu yang berkembang semakin meluas bahkan kontroversial.

Oleh karena itu studi ini dilakukan untuk menganalisis wacana publik yang terjadi di tanah air, sekaligus, memetakan perkembangan isu yang terjadi berkaitan dengan persoalan sensualitas, pornografi, dan politik tubuh perempuan yang dimunculkan akibat dari kasus kontroversial terhadap pelarangan bergoyang beberapa penyanyi dangdut perempuan di tanah air oleh kelompok-kelompok masyarakat, keagamaan dan individu tertentu. Lebih jauh lagi diharapkan dari studi ini bisa disimpulkan apa definisi pornografi, sensualitas, dan identitas perempuan yang berkembang di masyarakat, baik yang dilontarkan oleh negara, masyarakat, agama dan budaya Indonesia dari beberapa media massa yang telah dipilih dalam penelitian ini. Analisis lebih difokuskan pada statemen-statemen atau komentar yang diliput oleh pers dan komentar pers/institusi media sendiri, yang kemudian dirangkum untuk memunculkan wacana tentang identitas perempuan, sensualitas dan politik tubuhnya.

V.1. Persoalan Sensualitas dan Goyang Tubuh Perempuan di Media Massa

V.1.1. Perempuan dalam Media

Media massa adalah salah satu institusi ideologis yang mempunyai kekuatan penting dalam mensosialisasikan ide-ide dominan kepada khalayak (Hall, 1982). Menurut Hall, media bahkan menjadi institusi yang seolah membentuk dan melanggengkan konsensus atas isu yang berkembang di masyarakat. Media dalam perkembangannya di masyarakat lebih memberikan tempat pada opini-opini atau pandangan dominan dan/atau yang disebut dengan "mayoritas" pendapat. Kecenderungan media untuk memihak pada dominasi ideologis ini dikarenakan media mempunyai kepentingan ekonomi dan politik yang lebih didahulukan daripada peran ideal yang harus dilaksanakannya. Media jarang atau bahkan tidak pernah memberikan ruang pada perbedaan pandangan dan alternatif opini yang berbeda dari *mainstream* yang berkembang.

Banyak studi yang telah dilakukan menyimpulkan bahwa media tidak pernah memberikan gambaran atau konstruksi yang positif atas eksistensi perempuan. Walaupun kemajuan pada diri perempuan telah banyak dilansir oleh media, namun proporsi peliputannya amat kecil, jika tidak, liputan atas keberhasilan perempuan selalu dikaitkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang mempermasalahkan kehidupan domestik perempuan yang berhasil tadi.

Dalam kasus penyanyi Inul dan beberapa penyanyi perempuan lainnya, yang lebih besar lagi berkaitan dengan diri perempuan pada umumnya, pandangan yang berkembang ternyata lebih diarahkan pada konteks yang mengedepankan nilai-nilai keagamaan dan nilai-nilai moral sosial dan budaya yang ada. Sehingga isu-isu semacam ini sulit untuk didebat bahkan dikritik. Mengapa demikian? Karena dalam

masyarakat Islam seperti di Indonesia misalnya, persoalan keagamaan selalu menjadi hal rumit, jika berbicara tentang identifikasi perempuan dan eksistensinya disana. Itulah sebabnya, agama terkadang dipolitisir dan seringnya dipakai sebagai tameng akhir ketika berdebat soal perempuan. Beberapa opini dan pandangan berikut bisa dilihat bagaimana, kelompok-kelompok masyarakat, individu dan pejabat negara (sebagai representasi negara) berbicara dan mendefinisikan tentang eksistensi perempuan, terutama bagaimana popularitas seorang perempuan itu dibentuk dan ditentukan oleh faktor-faktor yang meliputinya.

Dalam beberapa tulisan media yang dianalisis dalam studi ini menampakan kecenderungan yang sama ketika mengomentari soal popularitas seorang selebriti perempuan, semacam Inul, dan beberapa penyanyi perempuan lainnya. Komentar yang diberikan media dalam pengantar tulisannya terhadap kasus Inul dan beberapa penyanyi dangdut cenderung untuk melihat bahwa eksistensi seseorang yang kemudian menjadi tenar dan populer ternyata ditentukan oleh dua faktor yang sama yakni industri media dan pemodal atau ekonomi kapitalis. Jika hal ini dilihat dalam konteks ekonomi politik komunikasi, maka sebenarnya yang menentukan eksistensi perempuan adalah ketika perempuan itu menjadi sebuah komoditi kapitalis yang ada. Tanpa campur tangan pemodal dan industri media, seorang perempuan tidak akan pernah menjadi populer atau terkenal, ironis memang. Kenyataan sebenarnya bahwa perempuan di monopoli oleh kapitalis media untuk keuntungan media, bukan karena alasan pemberdayaan perempuan. Tak pernah ada kalimat atau kata-kata yang menjelaskan bahwa media memberdayakan jati diri perempuan, tidak dengan mengikut sertakan kepentingan atau interes sepihak pihak pemodal.

Dalam tempo yang singkat, seseorang yang tadinya bukan siapa-siapa bisa mendadak menjadi seseorang yang tenar. Cepat dan tak terduga [...] Orang yang dipopulerkan media massa mungkin sangat berterima kasih karena merasa terangkat namanya.

Namun, di sisi lain, tanpa disadari, sesungguhnya media itulah yang membutuhkan mereka [...] (*Femina*, Mei 2003).

Apa yang dikatakan oleh majalah wanita di atas menunjukkan gambaran bagaimana eksistensi seseorang yang kemudia menjadi tenar atau populer karena bantuan dan upaya yang dilakukan oleh media. Namun telah disadari oleh majalah wanita itu sendiri, bahwa medialah yang sebenarnya membutuhkan sosok-sosok mereka untuk dijual kepada audiens, yang nantinya audiens ini dijual kembali kepada para pengiklan dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk kembali lagi mendatangkan keuntungan material kepada media.

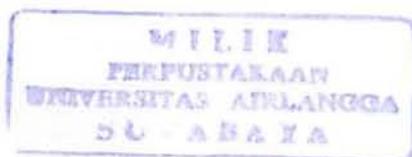
Perempuan masih saja mengalami nasib yang tidak menguntungkan. Perempuan seringkali disadari secara terbuka telah menjadi obyek komoditas dari kepentingan kapitalis media selama ini.

Inul telah membuat pundi-pundi stasiun TV yang menampilkan menjadi gemuk (*Bintang Millenia*, Mei 2003)

[...] Inul telah membuat kalang kabut para *programmer* mengubah acaranya untuk bisa menyelipkan Inul dalam *schedule*[...] Rating acara menjadi melonjak tiga kali lipat [...] Fenomena Inul seperti memaksa para *programmer* stasiun televisi mendefinisikan ulang apa sesungguhnya pengertian *what people need and what people want* [...] (*Cek & Ricek*, 14-20 April 2003)

Akibat kapitalisme, seorang perempuan dengan mudah dieksploitasi tanpa yang bersangkutan merasa dieksploitasi, bahkan dengan senang hati melakukannya. Ini bisa kita lihat di iklan-iklan yang menampilkan perempuan sebagai model (pernyataan Ketua Muslimat NU, Khofifah Indar Parawansa dalam *Gatra*, 18 Februari 2003, *Kompas*, 18 Februari 2003).

Namun sayangnya kesadaran akan fenomena ini dianggap seperti angin lalu saja. Dalam banyak kasus, sosok perempuan dan representasinya dalam iklan, film, opera sabun, bahkan dalam kasus penyanyi dangdut ini, telah memberikan kekayaan yang luar biasa kepada media, tetapi memberikan kecaman publik yang luar biasa pula kepada individu perempuannya. Kapitalisme telah memperlakukan perempuan sebagai mesin mendulang uang. Ironisnya kesadaran seperti ini tidak pernah memberikan stimulus sekaligus solusi pemecahan terhadap realitas perempuan yang dideskritkan oleh industri kapitalis media.



Pada beberapa tulisan media, hal yang lebih ironis lagi menyebutkan bukan karena institusi media yang membuat orang menjadi tenar dan populer tetapi karena fisik perempuan itu sendiri. Dalam kasus Inul misalnya, salah satu media cetak nasional memulai liputannya dengan nada yang mendeskreditkan diri perempuan, bahwa tak ada perempuan daerah yang bisa terkenal jika tidak karena 'tubuh seksi'-nya dan 'goyang maut'-nya. Perempuan disalahkan karena tubuhnya.

Jarang artis penyanyi dangdut Jawa Timur yang melambung namanya hingga mencapai popularitas di tataran atas musik dangdut dalam negeri. Dan, dari sedikit itulah Inul Daratista [...] makin ngetop gara-gara tubuh seksi dan goyang mautnya (*Kompas* 24 Januari 2003).

Kemampuan perempuan untuk bisa mengaktualisasikan dirinya dalam komunitas publik seolah harus terlebih dulu membuat aksi atau perilaku yang kontroversial. Karena goyangnya, karena seksi tubuhnya, karena kecantikannya, karena keanggunannya dan sebagainya, barulah seorang perempuan bisa eksis dalam ranah publik, bukan karena kegigihannya berjuang untuk mengalahkan dominasi baik laki-laki maupun dominasi kelas menengah tertentu. Pernyataan seorang politisi macam Marzuki Usman dari Partai Golkar, misalnya, hanyalah salah satu contoh dari pengakuan kaum laki-laki atas usaha dan perjuangan seorang beridentitas perempuan yang ingin bisa menentukan hak dan dirinya sendiri di masyarakat.

Ini adalah representasi perjuangan orang-orang pinggiran untuk survival, masuk ke lingkungan tengah untuk merebut sukses di tingkat nasional. Karena itu, kegigihan, orisinalitas dan kesuksesannya merupakan contoh perjuangan hidup yang patut dihargai," katanya (*Gatra*, 30 April 2003).

Menarik pula pernyataan yang ditulis oleh salah satu tabloid hiburan di tanah air, *Bintang Millenia*, misalnya. Dalam tulisannya tentang aksi goyang penyanyi perempuan dan isu pornografi, tabloid ini berpendapat bahwa jati diri perempuan, dalam kasus ini Inul, harus disadari sebagai bentuk kemandirian perempuan untuk berani menentukan dan mendefinisikan sendiri jati diri atau identitas "orisinilnya"—

dalam konteks ini, ide “orisinal” yang diartikan oleh tabloid ini adalah kemampuan, style atau gaya yang khas yang dimiliki oleh seorang perempuan bernama Inul.

Sebagai penyanyi, Inul memang fenomenal sekaligus sensasional. Keberaniannya tampil menjadi diri sendiri, membuat sosoknya orisinal (*Bintang Milenia*, Mei 2003)

Namun pernyataan ini menjadi bias ketika pada bagian yang lain, tabloid tersebut menyatakan bahwa simpati yang muncul dari masyarakat, termasuk media, menurutnya adalah karena sikap Inul yang “rendah hati, polos dan simbol perlawanan arogansi” (*Bintang Millenia*, Mei 2003). Sifat-sifat rendah hati dan polos dikedepankan sehingga muncul rasa kasihan, rasa empati dan simpati kepada perempuan. Jika berpikir anti positif, maka pernyataan tabloid semacam ini cenderung membiaskan realitas. Bahwa karena perempuan itu “lemah” (direpresentasikan dengan kalimat ‘rendah hati’ dan ‘polos’), maka perempuan harus dikasihani, harus diberikan simpati kepadanya. Yang lebih menarik lagi tulisan *Kompas*, dimana Inul dikonotasikan sebagai pribadi yang terlahir untuk menjadi kontroversial. “Inul Daratista...Memang dilahirkan sebagai manusia kontroversial” (*Kompas*, 1 Mei 2003). Tak ada seorang pun didunia ini yang ingin dilahirkan menjadi kontroversial. Namun kalimat diatas mengaburkan makna, bahwa seorang individu lahir dan diciptakan untuk menjadi kontroversi. Media sendiri telah mengkonstruksi bahwa identitas itu seolah diberikan atau *given* sejak individu dilahirkan. Pernyataan-pernyataan semacam inilah yang akhirnya memperteguh nilai-nilai dominasi dalam masyarakat, bahwa perempuan itu ternyata dilahirkan untuk menjadi manusia yang kontroversial, menjadi manusia yang mengundang perdebatan, dan yang akhirnya stigma ini menyudutkan perempuan dalam posisinya dimasyarakat, serta membenarkan bahwa perempuan adalah sumber masalah.

V.2. Definisi atas Konsep Sensualitas dan Politik Tubuh perempuan di Media Massa

V.2.1. Goyang Tubuh: antara Hak Perempuan, Kebebasan Berekspresi dan Kekerasan Perempuan

Apasajakah hak azasi perempuan? Bagaimana rumusnya? Pertanyaan-pertanyaan semacam ini seringkali muncul ketika para aktifis perempuan, akademisi, dan kalangan feminis mencoba membela dan memperjuangkan eksistensi dan nasib perempuan di masyarakat. Akan halnya dalam kasus para penyanyi dangdut perempuan di tanah air yang dikecam oleh kelompok-kelompok masyarakat dan keagamaan tertentu karena aksi goyang panggung dan penampilan fisiknya, perlawanan yang dipakai sebagai bentuk resistensi terhadap tuduhan-tuduhan yang merugikan perempuan sekaligus melecehkan fisik perempuan adalah dengan mengatasnamakan pelanggaran terhadap hak-hak perempuan.

Komentar-komentar yang dilansir oleh para aktifis perempuan, aktifis demokrasi, dan kelompok-kelompok yang pro terhadap reformasi dan perubahan kearah demokratisasi mengutamakan persoalan pelanggaran hak perempuan sebagai respon terhadap kecaman dan larangan yang diarahkan kepada beberapa penyanyi dangdut perempuan (dan tentunya pekerja seni perempuan di tanah air). Berikut beberapa petikan komentar dan pernyataan yang diliput media dalam kasus perseteruan Inul dan Rhoma Irama, termasuk dalam kontroversialisasi kasus goyangan Inul.

Setahu saya kebebasan berekspresi dan berkesenian tidak bertentangan dengan undang-undang, H Rhoma Irama tidak berhak untuk memasung atau mengekang ekspresi berkesenian seseorang dalam hal ini Inul, karena itu bertentangan dengan hak asasi manusia, mengingat kebebasan berekspresi dan berkesenian tidak melanggar undang-undang (Gus Dur dalam *Gatra*, 2 Mei 2003).

Kenaikan jumlah tindak perkosaan sama sekali tidak ada hubungannya dengan cara Inul berekspresi, tetapi disebabkan sistem hukum Indonesia yang tidak mampu memberi perlindungan kepada perempuan (*Gatra*, 2 Mei 2003).

Dalam sebuah negara demokrasi semua orang bebas untuk berekspresi, termasuk penyanyi dangdut [...] Ini kan negara demokrasi, pro kontra biasa saja, itu ekspresi masing-masing orang (Menag Said Agil, dalam *Kompas* 2 Mei 2003).

Sudah sewajarnya masyarakat memberi tempat bahkan penghargaan atas kreasi goyang yang diciptakan Inul. Gerakan itu merupakan hasil dari kemampuan berolah tubuh yang prima (Prof Dr. Edi Sedyawati, dalam *Kompas*, 1 Mei 2003).

Wacana yang berkembang di kalangan para penganut demokrasi di tanah air hampir semuanya memiliki kesamaan pandangan terhadap resistensi yang dilakukan terhadap eksistensi goyangan tubuh perempuan. Bahwa goyang tubuh (para penyanyi dangdut) adalah bentuk dari kebebasan berekspresi, atau kebebasan berolah tubuh dalam kesenian, karenanya jika dilakukan pelarangan, maka bentuk-bentuk pelarangan tersebut adalah wujud tindakan pelanggaran terhadap hak-hak (termasuk hak perempuan dalam hal ini) untuk mengekspresikan kapabilitas yang dimiliki oleh seorang individu, apapun profesi dan statusnya.

Tuhan saja tidak memaksa manusia untuk memeluk suatu agama, semua diserahkan kepada manusia itu sendiri yang telah diberi akal, pancaindra, dan intuisi sehingga dapat berpikir yang paling baik buat dirinya (Musdah Mulia, dalam *Kompas* 4 Mei 2003).

Disadari atau tidak, pada kenyataannya memang kecenderungan penghargaan terhadap hak-hak perempuan dalam ranah publik relatif masih kurang apresiasinya. Pemberian kebebasan gerak dan ekspresi perempuan di ranah publik seringkali berbenturan dengan nilai-nilai moral, keagamaan dan budaya. Kasus yang sama terjadi pada beberapa penulis dan pelukis perempuan, yang beberapa karyanya dinilai mengundang kontroversial, karena itu harus dilarang atau dicekal, dan dicemooh.

Namun tidak terjadi pada para pekerja seni laki-laki yang mempunyai kebebasan mengekspresikan hasil karyanya, walaupun lebih kontroversial dari yang dihasilkan oleh perempuan sekalipun. Ayu Utami misalnya, novelnya dinilai dan ditentang telah mengeksploitasi pornografi, sementara banyak tulisan novel yang ditulis oleh penulis laki-laki yang lebih vulgar daripada hasil karya Ayu, tapi tidak pernah dipertentangkan dan dilarang. Marginalisasi atas hasil karya perempuan telah memenjarakan perempuan pada posisi yang terpinggirkan, bahkan cenderung terisolasi.

Pihak yang keberatan dengan gaya Inul di panggung punya hak untuk keberatan tetapi Inul tetap seorang warga negara yang punya hak mengekspresikan diri (Myra Diarsi-Komnas Perempuan, dalam *Gatra*, 2 Mei 2003).

Usulan pencekalan terhadap Inul pun merupakan tindakan sewenang-wenang dan berlawanan dengan Undang-Undang HAM nomor 39 tahun 1999 yang menjamin hak setiap warga negara mengekspresikan diri dan pemikiran, berpartisipasi dalam aktivitas budaya di komunitasnya, dan hak menikmati seni budaya (Komnas Perempuan, dalam *Kompas*, 4 Mei 2003).

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perempuan sendiri menyatakan bahwa pelarangan yang dilakukan, tidak hanya terhadap Inul, tetapi pada para pekerja seni perempuan lainnya, adalah wujud dari bentuk kekerasan terhadap perempuan. Baik kekerasan fisik maupun pada kekerasan psikologis. Tak disadari memang oleh kelompok-kelompok sosial yang menekan kebebasan berekspresi perempuan, bahwa aksi yang dilakukannya telah jauh memberikan dampak pada aspek fisik dan psikologis diri perempuan. Dalam kasus Inul dan para penyanyi dangdut perempuan lainnya, Komnas Perempuan menyatakan:

Telah terjadi kekerasan fisik dan psikologis terhadap penyanyi dangdut Inul Daratista. Secara fisik kekerasan itu berupa pelarangan terhadap Inul untuk tampil menyanyi dengan menggunakan gerakan ala Inul, sedangkan kekerasan psikologis telah terjadi karena pelanggaran itu menyebabkan Inul mengalami trauma psikologis (Prof.Dr. Saparinah Sadli, dalam *Kompas*, 4 Mei 2003).

Dari berbagai perspektif, kalangan Islam liberalism, penganut demokrasi dan gerakan feminisme liberal, menanggapi dengan respon yang sama terhadap aksi

363.47. Sur. P. 1

Politik antar

Koleksi kejurus 2

kampus B.

pelarangan terhadap goyang atau gerakan para penyanyi dangdut perempuan di tanah air. Fenomena ini mencerminkan bahwa dalam masyarakat masih ada kaum resisten yang menolak adanya pandangan-pandangan ideologis yang tradisional dan konservatif terhadap jati diri perempuan. Eksistensi dan identitas perempuan selama ini memang harus "berperang" melawan kekuatan ideologis semacam ini dalam masyarakat. Sementara media massa sendiri tampaknya tak pernah bersikap jelas atas kondisi yang terjadi. Media hanya melihat kepentingan mana yang lebih mengedepan pada saat isu atau peristiwa terjadi dalam realitasnya. Dalam hal ini, tidak ditemukan bagaimana media massa, terutama pers cetak, bersikap atas pelarangan yang dilakukan terhadap goyang tubuh perempuan ini.

V.3. Wacana Politik Tubuh (Perempuan) di Indonesia

Dangdut adalah musik yang diidentikkan dengan selera kelas menengah bawah di Indonesia. Kehadiran musik dangdut dalam sejarah perjalanan bangsa ini tidak pernah mendapatkan tempat yang baik. Dangdut sebagai musik marginal telah mengalami kemajuan ketika rejim kekuasaan Orde Baru menggunakannya sebagai alat penarik massa pada peristiwa-peristiwa kampanye. Jadilah musik dangdut sebagai alat politik penguasa merebut simpati dan perhatian massa. Bahkan para penyanyi dangdut masa Orde Baru pun telah dipolitisasi untuk menjadi partisan tentu saja kepada partai terbesar kala itu, Golkar.

Musik yang merupakan perpaduan antara kebudayaan Melayu dan Hindi, bukanlah sebuah musik yang tumbuh dalam akar *indigenisasi* budaya masyarakat di tanah air. Namun popularitasnya menempatkan musik dangdut sebagai bagian dari budaya khas massa di Indonesia. Walaupun telah lama ada, musik dangdut sering

dinilai 'kampungan', 'berselera rendah' dan 'norak'. Ketika siaran televisi mulai ada di tanah air, musik dangdut terangkat menjadi salah satu program di televisi Indonesia. Karena popularitas di balik layar musik dangdut memang sudah tinggi, maka tak heran jika acara musik dangdut di layar kaca juga mendapat perhatian besar dari para penggemarnya.

Era televisi swasta di tanah air yang ditandai dengan mengudaranya stasiun televisi swasta RCTI tahun 1989 yang kemudian diikuti oleh maraknya perkembangan industri televisi swasta pada akhirnya, mengangkat citra musik dangdut ke permukaan. Dengan kata lain, musik dangdut telah mampu menembus target market yang dulunya tidak tertarik dengan musik ini menjadi pasar baru industri musik dangdut di tanah air. Kalangan menengah atas mulai suka dan terbiasa dengan tayangan musik dangdut di layar kaca. Apalagi dengan kepiawaian industri televisi swasta mengemas program musik dangdut, sehingga terkesan tidak lagi 'norak' dan 'kampungan' seperti sebelumnya. Bahkan program musik dangdut telah menjadi salah satu mesin pencetak keuntungan bagi televisi swasta. Lihat saja program '*Joget Dangdut*' di RCTI, '*Digoda*' dan '*Diva Dangdut*' di Trans TV, '*Musik Dangdut*' di TPI, bahkan '*Dangdut Pro*' di TVRI pusat menjadi acara andalan masing-masing stasiun televisi tersebut. Rating program-program tersebut dinilai cukup baik diantara program musik dan *variety show* yang lain.

Kata 'dangdut' pun adalah cerminan dari musik yang ditalu 'dang' dan 'dut' artinya perpaduan antara bunyi gendang dan ketipung yang menjadi instrumen musik khas bagi dangdut ini. Dalam setiap penampilannya dangdut selalu identik dengan goyangan. Alunan musik dangdut seolah membuat orang ingin bergoyang mengikuti iramanya. Sebenarnya hal ini tidak mengherankan mengingat akar musik dangdut sendiri yang terimbas dari Hindi (India) juga dipakai untuk seiring dengan tari-tarian

bersamanya. Karena dangdut identik dengan goyangan, maka dimanapun penyanyi dangdut selalu dianggap menarik kalau mereka bergoyang mengikuti irama musik yang dinyanyikannya. Sehingga sebenarnya goyangan pada pertunjukkan musik dangdut adalah hal biasa karena dilakukan bersamaan dengan penampilan penyanyinya, bukan hal yang disengaja dilakukan untuk 'menggiurkan' apa yang banyak diklaim orang, syahwat laki-laki.

Goyang dangdut bukan tarian streaptease, goyang dangdutpun ada sebagai bentuk paralelisasi penyanyi dan penampilan pada pertunjukkan musik dangdut. Jika tarian streaptease, atau apapun namanya yang dinilai mengundang syahwat itu sebenarnya tak berkonteks. Artinya tarian itu *intend* atau sengaja dilakukan untuk menarik (*arouse*) *sexual desire* atau gairah seksual para konsumennya. Sementara goyang dangdut dilakukan mengikuti irama musik yang mengiringinya. Jika lagu-lagu dangdut yang dibawakan bersifat melankolis, maka sudah pasti tak ada gerakan tarian yang menghentak, karena akan menjadi aneh kelihatannya. Namun jika musik dangdut yang mengiringinya menghentak-hentak, maka gerakan tariapun harus disesuaikan. Kolaborasi antara lagu, musik, dan tarian seolah mencerminkan bentuk harmonisasi suatu pertunjukkan seni musik. Sayangnya yang terjadi kemudian, apalagi dengan munculnya penyanyi dangdut Inul Daratista yang mempunyai ciri khas bergoyang dangdut tidak seperti para penyanyi dangdut lainnya, mengundang pro kontra isu dalam merespon fenomena ini.

Perkembangan wacana pro kontra Inul akhirnya merembet tidak pada aksi panggungnya tetapi pada bagian-bagian tubuh Inul, terutama pantat dan pinggulnya. Hampir semua hujatan yang diarahkan kepada kontroversi goyangan ini adalah pada adanya penonjolan bagian-bagian tubuh tertentu yang dianggap mengundang 'syahwat' dan sebagainya itu. Goyangan yang terkenal dengan julukan "ngebor" itu



telah menceraikan beraikan makna sebuah tarian dalam musik dangdut kedalam potongan-potongan tubuh perempuan. Bahkan tubuh-tubuh perempuan itu dianggap sebagai 'virus' yang menyebabkan sebuah 'wabah'. Menarik mengamati tulisan salah satu media besar nasional dalam menganalogikan tubuh perempuan itu.

Negeri dangdut sedang gonjang-ganjing. Warganya dilanda panik, pun halnya Sang Raja Dangdut. Ya, negeri dangdut saat ini tengah dilanda sebuah wabah. Namanya "wabah Inul!". [...] Betapa tidak, goyangan meliuk-liukan bokong bak puting beliung itu dituding telah mengembalikan musik kebesaran negeri dangdut ke dalam comberan. Bahkan lebih dasyat lagi, si empunya goyang ngebor dituding pula telah mempertontonkan goyang ranjang ke atas pentas.[...]Sang Raja gusar. Melalui organisasi yang dipimpinnya...lalu mengeluarkan titah agar virus 'Goyang Ngebor' yang disebar segera dibasmi. Jika tidak, kehancuran moral negeri dongeng tak kan terelakkan (*Kompas*, 1 Mei 2003).

Ada dua hal menarik yang bisa dilihat dari tulisan media di atas. *Pertama*, penonjolan Sang Raja Dangdut diberikan kepada sosok laki-laki—yang dalam konteks persoalan di tanah air kita semua tahu dia adalah Rhoma Irama—yang dari tulisan itu dianggap punya kuasa dan perintah untuk membasmi "virus" (perempuan) dari negerinya. Karena perempuan adalah "virus" yang menyebabkan wabah dan wabah tadi bisa merusak moral bangsa, maka perempuanlah yang menjadi pihak disalahkan merusak moral bangsa. Pendegradasian dan fetisisme perempuan dalam kasus ini menunjukkan sekali lagi, bahwa media cenderung mendukung 'status-quo' atau ideologi dominan patriaki yang menempatkan perempuan pada posisi yang disalah-salahkan atau menjadi kambing hitam permasalahan. Sementara, laki-laki—yang dalam konteks Foucault (1979) bisa termasuk sebagai salah satu '*disciplinary practice*' yang memegang kekuasaan dan kekuatan untuk menekan gerakan tubuh (perempuan)—dengan kekuasaannya itu "menitahkan" (dalam bahasa media di atas) untuk membasmi "virus" itu yang tak lain adalah perempuan. Sungguh naif! Pernyataan media massa yang senada juga terlihat pada kutipan berikut, betapa si Raja Dangdut tak bisa disalahkan karena dialah yang telah menapakkan musik dangdut,

dan seolah sebagai satu-satunya “penguasa” belantara musik dangdut di tanah air, yang mendudukkannya pada tempat yang lebih baik dan bermartabat.

[...]Tapi sesungguhnya tindakan Rhoma bukan sama sekali tak bisa dipahami. Dalam peta musik dangdut, Rhoma adalah legenda hidup. Dia adalah pelopor, pendobrak sekaligus tokoh yang paling berperan dalam perkembangan musik dangdut. Dengan kejeniusannya sebagai pemusik, tak berlebihan kalau Rhoma mengklaim sudah melakukan revolusi dalam musik dangdut [...] Betapun kita tak bisa menafikkan perannya dalam sejarah dangdut. Dialah tokoh paling berpengaruh sekaligus penting dalam jagad dangdut (*Bintang Millenia*, Mei 2003).

Kedua, pernyataan yang ditulis oleh Kompas di atas menunjukkan bahwa bentuk-bentuk analogi yang dilakukan media terhadap sebuah bentuk kreatifitas seni tari telah jauh melenceng dari akar permasalahan yang ada. Tubuh perempuan adalah “virus” yang mampu merusak moral bangsa. Dalam fenomena ini, tubuh yang melekat pada perempuan telah diartikulasikan dalam konteks penindasan tak langsung yang dilakukan oleh gerakan-gerakan yang dalam istilah Michel Foucault (1979) disebut sebagai ‘*a darker counter movement*’. Foucault sendiri menyatakan bahwa institusi-institusi sosial politik, termasuk media massa, atau yang dia sebut dengan konsep “*the disciplinary practices*” telah mengeksploitir tubuh sebagai alat untuk menekan kekerasan kepada pemilik tubuh itu sendiri. Seperti apa yang dia katakan berikut:

What was then being formed was a policy of coercions that act upon the body, a calculated manipulation of its elements, its gestures, its behavior. The human body was entering a machinery of power that explores it, breaks it down and rearranges it. A “political anatomy,” which was also a “mechanics of power,” was being born; it defined how one may have a hold over others’ bodies, not only so that they may do what one wishes, but so that they may operate as one wishes, with the techniques, the speed and the efficiency that one determines. Thus, discipline produces subjected and practiced bodies, “docile” bodies (Foucault, 1979: 138).

Lebih jauh lagi apa yang dikatakan Foucault dalam bukunya *Discipline and Punish* (1979) dinyatakan bahwa feminine body atau tubuh keperempuanan menunjukkan adanya kebisuan (*the silence*) dan ketak berdayaan (*powerless*) atas institusi yang menekannya. Judith Butler (1985) mencoba untuk mengkonter pernyataan Foucault di atas bahwa, sebenarnya kita lahir ini sebagai perempuan atau laki-laki, bukan maskulin atau feminin. “*Femininity is an artifice, an achievement, a*

mode of enacting and reenacting received gender norms which surface as so many style of flesh" (Butler, 1985: 11). Maskulinitas dan feminitas lebih mengarah pada pemaknaan yang artifisial dan bentukan norma-norma gender di dalamnya lebih kuat. Sehingga pada akhirnya perbedaan maskulin dan feminin tidak berpihak pada pensifatan feminin bagi perempuan, termasuk bagian-bagian tubuhnya yang seringkali dicap sebagai tubuh-tubuh yang feminin: yang diam (*silence*) dan tak berdaya (*powerless*).



Pernyataan Butler paralel dengan yang dikemukakan oleh Greer (1971), seksualitas perempuan telah ditopeng dan dibentuk ulang oleh para pengamat. Perempuan dianggap sebagai obyek seksual untuk keperluan dan apresiasi terhadap obyek seksual yang lain, yakni laki-laki. Seksualitas perempuan selain di acuhkan tetapi juga *misrepresented* atau direpresentasikan keliru dengan mengidentifikasikannya secara pasif.

Beberapa pernyataan yang dilontarkan aktifis perempuan di tanah air, menyikapi respon keras terhadap goyang Inul, juga lebih memfokuskan pada adanya pembiasaan pemaknaan tarian atau lebih tenarnya goyangan penyanyi dangdut perempuan dengan komentar atau perhatian terhadap pemenggalan atau potongan-potongan tubuh perempuan. Sehingga pada akhirnya gejala ini menimbulkan pelanggaran atas hak asasi perempuan sekaligus mengarah pada perlakuan tindak kekerasan. Seperti beberapa kutipan berikut:

Komnas menyatakan prihatin sebab ekspresi Inul direduksi menjadi hanya bagian-bagian tubuhnya, bukan keseluruhan kreativitas dan bakat yang perlu dihargai. "Padahal ekspresi Inul adalah keseluruhan jiwanya, kenapa direduksi menjadi bagian-bagian tubuhnya? Jika itu yang terjadi, maka telah terjadi kekerasan.[...] Ada eksploitasi atau tidak, indikatornya adalah siapa pemegang kontrol, kendali. Jika Inul melakukannya tidak karena dipaksa, tidak karena hubungan kuasa yang timpang, maka tidak ada eksploitasi," (Myra Diarsi Komnas Perempuan dalam *Gatra*, 2 Mei 2003).

Dalam ukuran Islam tubuh bukan untuk dieksploitasi, tapi Indonesia adalah negara hukum. Karena itu seharusnya orang mengedepankan hukum sebagai panglima (Musda Mulia dari Kajian Agama dan Gender Depag, dalam *Gatra*, 2 Mei 2003).

Dikatakan oleh Bartky (2003), bahwa terdapat perbedaan gender yang signifikan dalam hal posisi tubuh (*gesture*), bentuk tubuh (*posture*), gerakan (*movement*), dan kompatemen tubuh lainnya antara perempuan dan laki-laki. Bahkan dalam hal ini, perempuan jauh lebih dibatasi daripada laki-laki dalam cara mereka bergerak dan ruang geraknya. "*Women are far more restricted than men in their manner of movement and in their spatiality*" (Bartky, 2003: 29). Ruang perempuan

(*women's space*) yang “terbatas”, dalam arti dibatasi oleh aturan, norma, adat, budaya, dan nilai-nilai ideologis, membuat tubuh perempuan tidak bisa bebas untuk digerakkan, diperlebar, atau bahkan postur tubuh perempuanpun harus dibentuk sedemikian rupa agar bisa diterima oleh umum. Dalam kaitan inilah, apa yang dilakukan oleh para penyanyi dangdut perempuan di tanah air pun harus dibatasi. Artinya mereka boleh bergoyang atau berjoget atau menari asal gerakannya diatur, dibatasi, tak boleh “meluaskan” gerakan terutama bagian-bagian tubuh yang dianggap “feminin” misalnya, bagian pinggul, pantat, dada, dan sekitar lengan atas atau ketiak perempuan. Lihat, saja bentuk tari-tarian Jawa, lengan bagian atas jarang sekali terangkat dengan lebar, sementara bagian-bagian tubuh perempuan yang dikatakan feminin tadi harus rapat-rapat ditutup dan dibatasi gerakannya. Sehingga apa yang dilakukan oleh Inul dan beberapa penyanyi dangdut perempuan dengan goyangan yang membebaskan gerakan seluruh bagian tubuhnya, dianggap menyimpang dan menyalahi aturan yang telah dikonstruksikan sejarah historis kedalam budaya dominan yang ada. Sungguh ironis ketika gerakan-gerakan tubuh ini lalu dianggap ‘merangsang’, mengundang ‘libido laki-laki’, dan bersifat ‘erotis’.

Inul sendiri mengaku tidak percaya dengan apa yang telah direngkuhnya sebagai sosok artis penyanyi dangdut yang telah menjadi fenomena atas aksi panggungnya yang sangat merangsang libido kaum pria. Gerakan pinggul memutar, seperti layaknya gerakan alat bor ini memang sangat erotis (*Kompas*, 24 Januari 2003).

Goyang “ngebor” penyanyi dangdut Inul Daratista, yang kini menjadi sorotan masyarakat, dinilai melewati batas norma agama, budaya bangsa Indonesia dan hukumnya haram menurut ajaran agama Islam, kata pakar Islam Prof Dr Hasanuddin AF MA. “Seni itu tidak dilarang sejauh masih dalam batas-batas moral yang *legitimit*, tapi bila kreasi seni membawa dampak negatif terhadap dirinya dan orang lain menjadi haram hukumnya. Silakan mencari popularitas dengan cara-cara yang dihalalkan. Jangan mencari popularitas dengan cara-cara yang dilarang agama dan bahkan membahayakan orang lain akibat menyaksikan berbagai aktivitas popularitas seperti goyang ngebor Inul tersebut (*Gatra*, 18 Februari 2003)

“*Woman's body is an ornamented surface too, and there is much discipline involved in this production as well*” (Bartky, 2003: 31). Karena tubuh perempuan dianggap merupakan ornamen, maka penggunaan make up dan pemilihan pakaian semuanya

terlibat pada pemaknaan tubuh perempuan. Tubuh perempuan harus kelihatan halus, lembut, dan lentur, karena tuntutan ini, maka perempuan dianggap harus menjaga penampilannya untuk tetap kelihatan seperti ini. Namun juga, perempuan harus menutupi kehalusan dan kelembutan kulitnya ini dengan pakaian yang mendukung. Karena kelenturan tubuh perempuan, maka perempuan tidak boleh menggunakan pakaian ketat yang mempertontonkan tubuhnya, misalnya. Sehingga karena tubuh perempuan adalah "*ornamented surface*" tadi, maka kebebasan gerak tubuh perempuan sekali lagi dibatasi oleh 'kaidah-kaidah' femininitas ini. Refleksi atas fenomena ini bisa dilihat dalam kutipan pernyataan salah satu tokoh MUI yang dimuat dalam majalah Gatra berikut:

[...] Mujib lalu menyitir Al-Quran surah *An-Nur* ayat 30-31. Dalam ayat-ayat tersebut ditegaskan agar seseorang menahan pandangan, menjaga kehormatan, dan jangan menampakkan perhiasan untuk diperlihatkan kepada orang lain. "Yang membuka aurat berarti tidak menghormati kepribadiannya sendiri," katanya. Selain Al-Quran, Mujib juga menyitir hadis riwayat Imam Bukhari. Dalam hadis itu disebutkan, ada dua golongan ahli neraka yang tidak akan pernah dilihat Rasulullah SAW. Pertama, mereka yang otoriter, dan kedua perempuan yang kalau berjalan melenggak-lenggok menunjukkan lekuk tubuhnya. "Yang ditampilkan Inul lebih dari lenggak-lenggok," Mujib memberi penilaian. "Penampilan Inul cenderung menyimpang dari moral dan ajaran agama," ia menambahkan (dalam *GATRA*, 24 Februari 2003)

Goyang tubuh perempuan ternyata tidak hanya dianggap⁶ sebagai virus, tetapi jauh lebih dari itu dianggap sebagai "setan". Sungguh malang nasib perempuan sudah termarginalkan perannya, masih saja dikatakan kerasukan setan. Kutipan pernyataan berikut menarik dilihat:

Saya sayang kamu Inul, tapi saya marah karena setan yang ada dalam dada kamu. Kamu harus sadari di belakang kamu ada yang mengeksploitir kamu (pernyataan Rhoma Irama, dalam *Nova*, 4 Mei 2003).

Agama, budaya dan nilai-nilai kemasyarakatan adalah institusi-institusi yang dipakai sebagai tameng untuk menekan posisi dan peran perempuan dalam masyarakat, terutama di Indonesia. Untung saja dalam konteks ini, negara tidak mengambil sikap tegas dengan melakukan perlawanan resistensi terhadap bentuk-bentuk kreatifitas dan

ekspresi diri manusia warga bangsanya. Institusi agama, terutama Islam, di tanah air selama ini dinilai telah “menjerat” kebebasan dan kemerdekaan kaum perempuan untuk berkiprah di ranah publik. Masa kekuasaan rejim Orde Baru dulu, agama dan budaya Jawa menjadi diskursus yang mengedepan untuk merumuskan identitas-identitas individu perempuan dalam peran dan statusnya di Indonesia. Peran perempuan terkesampingkan dan diletakkan pada posisi domestikasi dan sekunder terhadap laki-laki. Dibalik kesuksesan laki-laki selalu ada perempuan, tetapi dibalik kesuksesan seorang perempuan, tak pernah dikatakan ada laki-laki disana. Dalam kaitan ini, suksesnya individu perempuan lebih karena perjuangannya sendiri, sementara suksesnya laki-laki karena dukungan perempuan yang kuat di “belakang” atau di daerah domestik. Agama dan budaya seolah pagar besi yang kuat mengungkung kemerdekaan perempuan untuk menjadi resisten terhadap dominasi ideologi patriarki yang lama menyelimutinya. Atas nama agama dan budaya, perempuan dianggap sebagai *the second person* dalam proses pembangunan negara. Walaupun gerakan-gerakan kaum feminis liberal dan kaum Islam liberal di tanah air sudah semakin meluas, tetapi tetap saja “jeruji” agama dan budaya sulit untuk didobrak dan didekonstruksi dengan pendekatan-pendekatan yang lebih humanis, demokratis, dan obyektif.

V.4. Isu yang Terlibat dalam Proses Artikulasi dan Pendefinisian Konsep Sensualitas dan Goyang Tubuh Perempuan di Indonesia

V.4.1. Sensualitas Perempuan, Erotisme, dan Pornografi

Tubuh perempuan mengandung ‘sensualitas’ didalamnya. Karena mengandung sensualitas yang mengarah pada erotisme menggugah birahi laki-laki

maka yang dilakukan para penyanyi dangdut perempuan termasuk dalam pornografi. Pornografi dapat merusak mental dan moral bangsa, karena itu harus diberantas. Demikian logika-logika pemikiran yang dirangkum dari kutipan-kutipan tulisan di media massa cetak dalam menanggapi goyangan penyanyi dangdut perempuan baru-baru ini.

Yang saya tentang bukan Inulnya, melainkan erotisme dan sensualitas.[...] Apa yang saya lakukan untuk menjaga moralitas bangsa (komentar Rhoma Irama, dalam *Bintang Millenia*, Minggu pertama Mei 2003)

"Saya haramkan lagu-lagu saya dibawakan Inul dan Annisa. Mereka adalah lokomotif goyang sensual saat ini. Goyangan mereka tidak artistik dan memicu selera rendah manusia." Begitu 'fatwa' Bang Haji ketika mengumumkan pencekalan terhadap Inul dan Annisa (*Surya*, 25 April 2003)

Kalimat-kalimat seperti diatas mencoba untuk mengaitkan antara goyang tubuh dengan persoalan 'sensualitas', 'erotisme' dan 'pornografi'. Dalam konteks kehidupan sosial politik di Indonesia, batasan-batasan terminologi sensualitas, erotisme, dan pornografi saling tumpang tindih. Tak ada rumusan jelas disana baik dari sisi hukum legal formal maupun aturan konvensi yang disepakati bersama. Seolah semua pihak punya batasannya sendiri. Apa yang dilontarkan berbagai kalangan dari negarawan, politisi, ahli agama, kyai, menteri, dan kaum feminis Indonesia semuanya atas persepsinya masing-masing terhadap pemahaman pornografi, erotisme, dan sensualitas itu sendiri.

Penyanyi dangdut A. Rafiq mengatakan, tindakan yang bisa dikategorikan sebagai pornografi dan pornoaksi dinilai dari batasan agama, budaya dan adat istiadat daerah. Batasan pornografi, menurut dia, tidak terlepas dari masalah agama, budaya, dan adat istiadat daerah. Jadi, katanya, kalau "goyang ngebor" ditampilkan di Papua dan diterima oleh adat setempat, maka dipersilakan saja, karena misalnya menurut adat dan budaya setempat itu bukan termasuk porno. Tetapi kalau sudah bicara masalah rangsangan, katanya, menurut agama hal itu dilarang. "Allah saja mengharamkan *khomar* (minuman keras) tidak soal sedikit atau banyak," katanya (*Gatra*, 12 Mei 2003).

"Kenapa yang disalahkan kok Inul, bukan orang yang terangsang. Semua tergantung dari pikiran masing-masing. Kalau melihatnya dengan pikiran *ngeres*, akan terangsang (pernyataan Maria Darmaningsih, dalam *Bintang Millenia*, Minggu pertama Mei 2003)



“Secara pribadi, saya melihat goyangan yang pelan-pelan justru dapat merangsang. Bukan goyangan yang cepat seperti Inul. [...] Patokan porno sangat relatif. Pada Inul, coba lihat pakaiannya sopan dan tertutup. Goyangannya paling dari atas ke bawah atau dari kanan ke kiri. [...] Tidak ada ketentuan dari segi hukum yang menyebutkan goyangan Inul itu porno” (pernyataan Hotman Paris Hutapea SH, dalam *Nova*, 4 Mei 2003).



"Kalau memang otak sudah *ngeres*, bicara apa saja jadinya juga *ngeres*. Kalau bicara dangdut dengan orang yang otaknya *ngeres*, pasti pikiran mereka ke goyangan yang erotis. Tak perlu dipicu goyangan Inul!" (pernyataan Guruh Soekarnoputra, dalam *Nova*, 4 Mei 2003)

"Kalau perlu harus dibentuk satuan tugas tentang pornografi dan pornoaksi serta diperjelas batasan mengenai kedua hal itu. Kalau kita perhatikan, batasan atau definisi tentang pornografi saat ini terlalu sederhana. Misalnya, penampilan baru dianggap porno jika sudah tidak mengenakan pakaian apa pun, sehingga jika masih ada kain yang menempel, walau minim, masih dianggap bukan porno," (Khofifah Parawansa, dalam *Gatra*, 18 April 2003).

Goyangan Inul bukanlah sesuatu yang tergolong porno. Goyangan Inul adalah salah satu bentuk olahraga yang sulit dilakukan orang kebanyakan...(komentar Dr. Boyke dalam *Jawa Pos*, 5 Juni 2003).

"Saya melihat Camelia Malik lebih erotis. Elvy Sukaesih gaya panggungnya juga sangat menggoda. Bukan cuma gerakan, ekspresi wajahnya juga erotis. Dibandingkan mereka, Inul tidak ada apa-apanya. Inul itu saya lihat energetik. Inul tetap harus maju. Kalau menyerah, berarti dia kalah." (Rieke Dyah Pitaloka, artis, dalam *Gatra*, 6 Mei 2003)

"Goyangan Inul itu sulit. Saya mencermati itu sebagai hal yang baru. Erotis atau *nggak*, tergantung kepala kita sendiri. Cobalah dikontrol. *Salahin* saja diri sendiri, jangan *salahin* orang lain. Kalau dianggap terlalu porno, *ya pindahin aja channel tv-nya*."

(Olga Lidya, model dalam *Gatra*, 6 Mei 2003)

Membaca semua pernyataan di atas baik dari yang pro dan kontra terhadap goyang tubuh perempuan, yang direpresentasikan dalam kasus Inul ini, mempunyai patokan definis yang berbeda-beda tentang pornografi, erotisme dan sensualitas. Tak ada satupun yang menyebutkan batasan atau definisi terminologi sensualitas, erotisme dan pornografi secara tuntas dan mampu dipahami. Tidak ada satupun aspek hukum yang dikutip dalam menyatakan suatu gerakan tarian yang dilakukan oleh seorang perempuan termasuk dalam kaidah porno, erotis dan sensual. Ini membuktikan masih lemahnya sistem hukum atau kesepakatan aturan di Indonesia terhadap terminologi dan kaidah-kaidah pornografi. Apakah pornografi itu identik dengan telanjang tanpa baju (*nudity*), seperti apa yang dilansir oleh Khofifah mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan? Ataukah pornografi dan erotisme itu identik dengan ekspresi wajah, dan goyang tubuh yang menggoda, seperti yang dinyatakan oleh Rieke Pitaloka? Ataukah pornografi atau erotisme itu identik dengan pakaian terawang, pakaian ketat, yang

menonjolkan aurat? Atau yang manakah pornografi itu? Rumusnya tidak ternyata bergantung kepada persepsi kepala masing-masing orang.

Menarik membaca liputan majalah *Gatra* ketika mewawancari Rhoma Irama dan mempertanyakan mengapa penyanyi dangdut lainnya, macam Camelia Malik dan Elvy Sukaesih tidak termasuk dalam kategori yang dilarang. Jawaban Rhoma sebagai berikut: "Karena mereka goyang dangdut dengan goyangan yang indah, yang bisa dinikmati dan berhubungan dengan musikalitas; dalam batas-batas yang artistik dan estetik. Sedangkan goyang Inul adalah goyang erotis, goyang mesum seperti juga goyangnya Anisa Bahar dan lainnya". Sementara ketika ditanya bagaimana cara mengukur sebuah goyang yang merangsang birahi orang atau tidak. Jawaban Rhoma lebih diarahkan pada pengaruh yang ditimbulkan akibat dari menonton goyangan penyanyi dangdut perempuan. Seperti pernyataannya berikut: "Elvy Sukaesih, Camelia Malik dan lain-lain, berpuluh-puluh tahun goyang di panggung dangdut. Tidak pernah ada keresahan, protes, bahkan tidak pernah ada perkosaan. Tapi mengapa ada orang yang mengatakan bahwa setelah menonton VCD Inul maka dia memperkosa orang. Saya pernah melihat VCD Inul saat tampil di *RCTI*. Adegannya, pemain gitar di bawah, dan dia di atasnya; lantas dia menggoyang-goyangkan pantatnya sedemikian rupa, seperti memindahkan adegan ranjang ke atas pentas. Dan itu ditayangkan di TV" (*Gatra* 5 April 2003). Berarti semuanya sama, selama adegan atau tarian atau goyang yang dilakukan oleh para artis dangdut perempuan tidak menyebabkan terjadinya tindak pemerkosaan atau mempengaruhi perilaku seksual konsumennya, maka selama itu pula tidak bisa masuk dalam kategori erotisme, sensual, dan porno.

Seperti beberapa komentar dan pernyataan yang dikutip di atas, bahwa batasan porno tidaknya suatu adegan, tayangan, tampilan sebuah karya seni tergantung pada

kepala dan otak masing-masing individu. Kalau mereka terangsang, tergairahkan oleh tayangan-tayangan atau tampilan-tampilan itu, maka mereka menganggap pornografi. Atau jika otak kita “ngeres” (istilah Guruh), maka jadilah perbuatan kita “ngeres”. Dilema terminologi dan konsepsi pornografi di tanah air selalu menjadi barrier atau kendala utama ketika bicara persoalan produk media atau budaya pop yang beredar di Indonesia. Kategori yang tumpang tindih, tidak mutually exclusive ini, menjerumuskan banyak pihak berkepentingan untuk mengeksploitir atau mempolitisir bahkan mengkomersialkan produk yang dinilai tidak jelas dalam kategorisasinya. Bahkan fatwa yang dikeluarkan MUI bersifat ambigu. Pada tayangan tertentu MUI melarang, pada tayangan yang lain tidak dilarang. Dalam konteks kasus Inul, fatwa MUI melarang karena Inul dianggap “mempertontonkan sensualitasnya, dan karena itu haram adanya” (*Femina*, Mei 2003).

Lalu apakah arti atau definisi ‘sensualitas’ kalau begitu? Beberapa komentar dan analisis berikut barangkali membantu memberikan kejelasan tentang makna ‘sensualitas’.

Sensualitas yang selalu dieksploitir dalam perdagangan dunia hiburan terjadi di mana-mana di seluruh dunia, karena pada dasarnya manusia memang ‘membutuhkannya’. “Dulu, misalnya, poster Claudia Schiffer dilarang, karena membuat orang meleng. Kita harus mempercayai Sigmund Freud, ahli psikoanalisis, yang berpendapat bahwa ada aksi-aksi manusia yang bergerak karena dorongan-dorongan seksual” (pendapat Bre Redana, wartawan dalam *Femina*, Mei 2003).

“Kebudayaan populer yang kita lihat sekarang, semakin lama mempertontonkan pakaian yang semakin minim. Semakin sensual, karena harus menarik audience. Itu sebabnya, selain memberikan hiburan dengan lagu yang bagus, artis-artis juga memberikan impian tentang sensualitas” (komentar Doddy Sjahbudin, akademisi UI, dalam *Femina*, Mei 2003).

[...] “gerakan-gerakan erotis Inul itu menimbulkan hasrat seksual. Jadi yang kita persoalkan adalah erotisme dan sensualitas yang menimbulkan hasrat seksual dari kalangan remaja, dewasa, maupun orang tua (Amidhan, ketua MUI, dalam *Kompas*, 2 Mei 2003).

[...] “jika goyangan Inul bisa membangkitkan birahi lelaki, tentu saja yang patut disalahkan bukan Inulnya, melainkan laki-laki itu yang punya pikiran tidak beres” (Gadis Arivia aktifis perempuan, dalam *Femina*, Mei 2003).

"Harus dikaji erotisme sebagai hal yang subyektif, *nggak* bisa disamaratakan. Erotisme bisa jadi merupakan sesuatu yang inspiratif. Jadi, malah membuat orang menjadi produktif. Atau malah mendorong spiritualisme, melihat hal yang erotis langsung berdo'a. Inul jangan dikaitkan dengan masalah moral. Moralitas siapa yang dimaksud? Inul harus percaya diri, karena tidak melakukan kesalahan apa pun. Ia harus bebas bergoyang."(Butet Kertaradjasa, seniman, dalam *Gatra*, 16 Mei 2003)

Sensualitas menurut pandangan di atas adalah gerakan-gerakan dan perilaku yang dengan sengaja dilakukan untuk menarik khalayak. "Menarik khalayak/audiens" yang dimaksudkan dari makna yang tersirat adalah yang mampu mendorong rangsangan seksual. Namun kembali lagi, walau sensualitas atau aksi panggung dan pakaian yang dikenakan sengaja kelihatan sensual (*arouse sexual desire*), selama penikmat atau konsumen tidak mempunyai pikiran "jelek" ke arah *sexual desire*, maka hal tersebut sah-sah saja dan bukan terkategori aksi erotisme atau pornografi. Sementara itu 'sensualitas' sendiri adalah pemahaman yang ternyata berada pada tataran 'imajinasi' (*imagination*). Artinya, sensualitas hanya bermakna atau mempunyai arti jika munculnya 'imajinasi' seksual individu terhadap obyek yang dilihatnya. Imajinasi ini berarti menempatkan konsep 'sensualitas' sebagai terminologi abstrak yang relatif pemaknaannya dalam pola kebahasaan ini. Selama tidak menimbulkan imajinasi atau birahi seksual, selama itu bukan masuk dalam kategori definisi terminologi 'sensualitas'.

Sementara itu bagaimana komentara para konsumen atau masyarakat kebanyakan dengan persoalan erotisme dan sensualitas ini sendiri. Hal ini perlu diketahui mengingat wacana sensualitas, seperti yang telah didiskusikan di atas, harus juga dilihat dari konteks pemaknaannya. Sementara pemaknaan itu berada pada otonomi konsumen yang mengkonsumsi aktifitas yang disebut sensual atau erotisme tadi sebagai suatu atraksi yang mengarah pada persoalan pornografi. Banyak pandangan yang bernada sama, bahwa semuanya tergantung pada pemaknaan

penikmatnya. Contoh-contoh dibawah ini menunjukkan bagaimana sebenarnya audiens punya persepsi dan retensi selektif terhadap produk media yang dikonsumsi. Audiens itu aktif dan punya otonomi untuk mengkonsumsi produk yang dipikiri oleh gerakan-gerakan massa sebagai atraksi porno.

- o Reaksi para *dangduter* tentu saja lain. Mereka merasa menikmati goyangan Inul. Contohnya Supriyono, 26 tahun. Lajang keluaran Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, Jawa Timur, tahun 2000 ini menyukai Inul. "Tergantung niatnya," katanya kepada *Gatra*. Maksudnya, kalau melihat Inul "ngebor" jangan mengkhayal yang bukan-bukan. Gerak meliuk-liuk Inul, menurut *marketing* di PT RJ London Chemical yang berkantor di Surabaya itu, tetap ada manfaatnya. "Kalau pulang kerja terus melihat goyang Inul, bisa langsung *fresh, ueenak*," katanya, sembari tersenyum renyah.

Penampilan Inul, masih menurut Supri, kini lebih sopan ketimbang tahun 2001, sebelum populer. Waktu itu, tampilannya sangat seronok. "Ketek dan *udele* (ketiak dan pusarnya --*Red.*) diperlihatkan, tapi sekarang lebih sopan," katanya. Selama masih menutup auratnya, meski terlihat lekukan tubuhnya, kata Supri, belum termasuk pornografi. Bagi Supri, meski suaranya pas-pasan, Inul itu energik, dan goyagannya tak bisa ditiru penyanyi dangdut lain. Di rumahnya, Supri mengoleksi lima VCD bajakan Inul yang dibelinya Rp 4.000 per keping. VCD tersebut menjadi teman setianya selepas kerja (*Gatra*, 24 Februari 2003)

Pleasure, atau kenikmatan yang diperoleh audiens beragam sifatnya. Kenikmatan sangat relatif bergantung pada persepsi individual. Selama audiens mendapatkan kenikmatan atas produk media yang dikonsumsinya, berarti konsep komodifikasi hiburan yang dalam istilah Karl Marx sebagai fetisisme ekonomik media, maka komoditi tadi berhasil di jual oleh para kapitalis media sebagai produk, sama halnya dengan barang dan jasa, kepada konsumen untuk kepentingan institusi media. Namun bertolak belakang dengan apa yang disampaikan dalam kutipan di bawah ini, bahwa kenikmatan atau *pleasure* adalah ranah privat yang dimiliki individu, tetapi "produk" yang dinikmati adalah ranah publik, milik siapa saja, karena itu wajar atau sudah sepantasnya mendapat cercaan atau kritikan. Wilayah privat dan publik ternyata mengalami perpendaran makna, dimana wilayah privat menjadi hak pribadi, sementara wilayah publik tak pernah boleh menjadi milik pribadi.

Selera adalah persoalan pribadi, sedangkan norma agama, hukum, kepatutan dan nilai-nilai lain yang tumbuh di masyarakat adalah persoalan publik yang sudah diakui dan disepakati. "Secara agama goyangan Inul dan Anisa Bahar yang kemudian ditiru banyak penyanyi dangdut lainnya, jelas telah melanggar batas". Secara norma, adat-istiadat dan kepatutan bangsa Indonesia, goyang Inul termasuk "tidak sopan", bila pantat atau pinggul disuguhkan ke muka penonton. (Sirikit Syah, aktifis LKM, dalam *Kompas*, 4 Mei 2003).

Ada aspek hukum, kepatutan, kepantasan dan kesopanan juga yang mewarnai fenomena goyang tubuh dan persoalan erotisme di Indonesia. Faktor-faktor ini begitu menguat, sehingga atas nama kepatutan dan kesopanan inilah, atraksi yang dilakukan perempuan harus dijaga. Gerakan tubuh perempuan tidak saja dibatasi oleh kekuatan yang tampak seperti institusi negara dan masyarakat, tetapi juga dibatasi oleh kekuatan yang abstrak seperti norma-norma agama, norma kesusilaan, dan norma sosial lainnya. Betapa berat perempuan harus menanggung atau menghadapi *barriers* atau kendala-kendala "tatanan" ini.

"Saya tidak menganggap itu sebagai suatu masalah. Kendati Inul bagian dari ponografi, tetapi ada yang lebih dari itu," kata Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan. Penempatan perempuan dalam suatu perfilman, periklanan dan sebagai hiburan dalam penayangan televisi acapkali menyuguhkan bentuk pelecehan tersembunyi terhadap perempuan," katanya Meneg PP (dalam *Gatra*, 16 April 2003).

Apa yang dikatakan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan di era Megawati Soekarnoputri di atas menyiratkan bahwa sekali lagi dari pertentangan atau kontroversialisasi isu sensualitas dan erotisme serta pornografi, perempuan tetap saja menjadi obyek atau stigma negatif yang berkepanjangan. Degradasi pensifatan pada diri perempuan semakin memperkuat anggapan bahwa sensualitas, pornografi dan erotisme adalah milik perempuan, karenanya perempuan berbahaya, sehingga melegitimasi bahwa perempuan pantas untuk dipinggirkan.

Sebagai perempuan, saya sedih. Masih ada kultur, perempuan tidak boleh bersuara keras. Kelihatannya itu juga yang terjadi pada Inul. Yang paling membuat saya sedih, goyangan Inul dikatakan menyebabkan pemerkosaan. Saya kenal Camelia Malik sejak tahun 70-an. Goyangan dia sangat provokatif. Dan saya tidak keberatan. Inul tidak provokatif. Dia bergoyang cuma mengikuti irama saja. Kalau Anissa Bahar, goyagannya pakai konsep. Dan, maaf, menurutku, itu provokatif." (Ratna Sarumpaet, seniman teater, dalam *Gatra*, 6 Mei 2003).



Kuatnya dalih-dalih agama, atau nilai-nilai budaya yang dipertentangkan sekaligus dibenturkan dengan peran dan eksistensi perempuan di dunia hiburan, terutama, menjadi sulit untuk didobrak (*challenged*). Masih banyak pihak yang berpijak pada kedua “dalih” diatas untuk melawan resistensi perempuan yang akan maju dan mengaktualisasikan dirinya.

Bila ada stigma atau vonis dijatuhkan dengan mengatasnamakan agama, [...], itu adalah pandangan yang sangat naif. [...] Menjaga moralitas tidak bisa hanya dituntut dari pihak perempuan, melainkan menjadi tanggung jawab bersama laki-laki dan perempuan (Musdah Mulia, aktifis perempuan, dalam *Kompas*, 4 Mei 2003)

Pendapat Musdah Mulia mungkin dianggap melenceng dari mainstream pandangan keagamaan, bahkan cenderung radikal. Model pandangan semacam ini di Indonesia masih harus dikontestasikan dan tidak sedikit yang dikonter oleh argumen-argumen yang konservatif dan militan. Seperti beberapa kutipan berikut:

“Goyang ngebor adalah maksiat yang wajib dicegah dan dilarang. FPI mendukung Rhoma Irama yang telah menegur Inul. Pernyataan-pernyataan yang mendukung Inul adalah upaya untuk melegalkan kemaksiatan atas nama demokrasi, kebebasan dan hak-hak asasi manusia.”(KH. Salim Nasir, Ketua Front Pembela Islam, dalam *Gatra*, 6 Mei 2003).

V.4.2. Global/Local dalam Wacana Erotisme dan Moral Bangsa

Globalisasi seringkali menimbulkan makna negatif, terlebih jika dilihat dalam konteks masuknya dominasi nilai-nilai asing kedalam budaya lokal. Atau merujuk pada konsep John Tomlinson (1991) bahwa globalisasi diidentikkan dengan ‘*cultural imperialism*’ atau imperialisme budaya, terutama budaya Barat (*Western*) ke dalam budaya negara-negara *Third World* (dunia ketiga). Imperialisme budaya selalu mendapat reaksi yang konservatif dan resisten dari negara-negara yang menerima produk globalisasi, yang lebih banyak datangnya dari industri media transnasional. Sama halnya dengan apa yang terjadi dalam konteks kontroversi isu goyang dangdut dan politik tubuh perempuan di Indonesia.

Beberapa pandangan yang diliput media menjelaskan bahwa budaya erotis, sensual, dan pornografi adalah akibat dari pengaruh buruk yang datang dari Barat. Produk-produk budaya Barat yang masuk ke Indonesia telah mempengaruhi masyarakat lokal, terutama para pekerja di dunia hiburan untuk mengikutinya. Arus global dianggap mengancam stabilitas dalam proses pembangunan mental dan moral bangsa. Bobroknya mental dan moral bangsa yang diperoleh sebagai akibat dari tontonan-tontonan yang mengundang sensualitas ini, sumber besarnya adalah dari media massa. Imperialisme budaya, seperti yang dinyatakan oleh Tomlinson (1991) di atas, ternyata kini kelihatan wujudnya dalam konteks permasalahan ini.

Kalangan ulama yang mewakili suara umat Islam bukan mempermasalahkannya itu, tetapi masalah perilaku erotis dan perilaku sensualitas karena adanya gerakan-gerakan yang mau diumbar sedemikian rupa seolah masyarakat Indonesia ini seperti masyarakat Barat yang tidak memiliki masalah mengenai hal itu (Amidhan ketua MUI dalam *Kompas*, 2 Mei 2003).

Memang selama ini tuduhan yang ditujukan kepada dunia Barat adalah terhadap perilaku bebas yang mengarah pada tindak pornografi. Budaya Barat tidak pernah dinilai positif tetapi selalu *vis a vis* melawan budaya lokal, dan tidak pernah bisa dipersandingkan dengan konteks lokal, tetapi selalu “diikuti” atau “dipinjam” oleh budaya lokal untuk memperkaya khasanah lokal. Sayangnya, suguhan-suguhan Barat seolah membahayakan eksistensi dan kelangsungan kehidupan atau tatanan lokalitas yang dinilai lebih agung, lebih baik, dan lebih bermoral. Datangnya produk Barat dianggap merusak dan mengganggu mental yang telah dibangun atas landasan kepercayaan dan nilai-nilai lokal suatu bangsa. Seperti tampak dalam ketakutan pada pengaruh erotisme dan pornografi yang datangnya dari Barat seperti pernyataan yang dikutip berikut:

Masyarakat dan bangsa Indonesia sebenarnya belum siap menerima suguhan erotis dan sensualitas yang bisa menimbulkan hasrat seksual sehingga bisa menimbulkan dampak seperti pemerkosaan dan kejahatan moral (Amidhan, dalam *Kompas*, 2 Mei 2003).

"Fenomena Inul itu justru menguatkan dugaan kita tentang adanya rekayasa global untuk menghancurkan umat dengan cara membuat opini publik bahwa persoalan pornografi dan pornoaksi seperti goyang Inul itu sudah diterima masyarakat." (*Gatra*, 13 Maret 2003).

Padahal dari studi yang dilakukan ini, ditemukan hampir pada semua publik yang berkomentar tentang goyangan tubuh penyanyi dangdut perempuan menambahkan bahwa sensualitas atau adegan-adegan yang terkategori dalam konteks ini, sebenarnya sudah mengakar dalam konteks lokal di tanah air. Banyak yang bicara bahwa gerakan-gerakan tari-tari lokal dan ujaran-ujaran dalam panggung hiburan rakyat di tanah air semuanya bisa tergolong dalam terminologi ini. Karena telah lama ada, maka dianggap biasa, alamiah dalam kehidupan sehari-hari.

Sensualitas yang dipertontonkan Inul ini sebenarnya merupakan hal biasa, kalau kita akrab dengan tontonan serupa di kampung-kampung, entah dangdut, ludruk, ketoprak keliling, dan sebagainya. Ya omongannya, ya plesetannya [...] Dangdut sekaten tidak ada yang celana dalamnya tidak kelihatan. Goyangnya pun luar biasa dengan rok mini. Sangat radikal dan liar. Di dunia dangdut kampung hal itu berjalan terus sampai sekarang (komentar Bre Redana, *Femina*, Mei 2003)

Goyang erotis semacam itu sudah ada dalam budaya kita dan mengakar kuat dalam kesenian tradisional semacam ronggeng melayu, cokek, dombret (Indramayu), dan lengger (Banyumas) (Ahmad Tohari budayawan, dalam *Kompas*, 21 Mei 2003).

Fenomena tarian erotis di Indonesia telah ada sejak dahulu, seperti pada tarian *ronggeng*, *ketuk tilu*, atau *tayub*. [...] Hingga kini tidak ada pengertian yang jelas mengenai erotis. "Tidak ada yang tertulis dalam undang-undang, atau peraturan karena itu harus ada nilai-nilai yang disepakati masyarakat" (Nungki Kusumastuti, penari, dalam *Kompas*, 1 Maret 2003).

Moral bangsa identik dengan persoalan nasionalisme dan identitas bangsa (nation identity) dalam perspektif poskolonial. Namun dalam konteks ini, dikaitkan dengan fenomena goyang dangdut penyanyi Indonesia, moral bangsa sangat jauh jika dihubungkan. Kalau goyang dangdut para penyanyi dilihat dalam hal ke-autentikannya, barangkali menarik. Karena fenomena dangdut dan goyangnya hanya ada di Indonesia, dan fenomena ini menjadi bagian dari budaya lokal khas yang mencerminkan cultural identity atau identitas budaya lokal yang ada di tanah air.

Sayangnya, jika perkembangan diskursus fenomena goyang dan kontroversi isu erotisme dikaitkan dengan persoalan moral bangsa, koneksi pemaknaannya menjadi jauh kebelakang. Demikian beberapa rangkuman pendapat yang dianalisis dalam studi ini. Salah satunya adalah pernyataan dua tokoh agama populer di Indonesia berikut yang menjadi salah satu contoh bagaimana kaitan itu tak berkonteks dalam kasus Inul, misalnya.

Masalah Inul itu terkait dengan pendapat bersama tentang batas-batas moralitas. Selama belum ada batasan-batasan seperti itu maka setiap orang bebas mencari batasannya sendiri. Makanya harus aktif mencari batasan-batasan itu (pernyataan Gus Dur, dalam *Bintang Millenia*, Minggu pertama Mei 2003).

"Terlalu kecil kalau cuma bicara Inul dibanding budaya erotisme yang telah sedemikian besar yang harus dikikis dan kalau bisa dihapus," kata Cak Hasyim, panggilan akrab KH Hasyim Muzadi. Cak Hasyim lantas mencontohkan dunia periklanan, terutama iklan-iklan yang ditayangkan di televisi yang mengumbar erotisme dan hedonisme, meski terkadang tidak ada kaitannya, seperti iklan obat, iklan mobil, dan sebagainya. "Penonjolan seks dan erotisme pada semua bidang itulah yang harus kita soroti. Jadi, tidak sekedar Inul," katanya seraya menambahkan bahwa tidak akan banyak berarti jika hanya meributkan goyangan Inul sementara membiarkan persoalan penonjolan erotisme yang lebih besar. (*Gatra*, 18 Februari 2003)

Berbeda dari pandangan kedua tokoh Islam yang dianggap lebih demokratis, tokoh-tokoh Islam konservatif masih beranggapan bahwa kaitannya erat antara gerakan yang dilakukan oleh seorang penyanyi dangdut macam Inul, dalam pertunjukannya terhadap persoalan moral bangsa, apalagi terhadap martabat umat Islam dan dekadensi moral masyarakat Indonesia pada umumnya. Kutipan berikut menunjukkan bagaimana para pemimpin Islam konservatif di tanah air berpendapat soal goyang tubuh perempuan dan degradasi moral dan nilai-nilai ke-Islaman seorang muslim.

Kreasi seni yang semula tidak diharamkan Islam menjadi dilarang dan diharamkan manakala keluar dari jalur yang telah ditentukan, seperti berakibat rusaknya moral remaja dan masyarakat serta (goyang ngebor) Inul, dinilai dapat menimbulkan birahi. Goyang "ngebor" penyanyi dangdut Inul Daratista, yang kini menjadi sorotan masyarakat, dinilai melewati batas norma agama, budaya bangsa Indonesia dan hukumnya haram menurut ajaran agama Islam, kata pakar Islam Prof Dr Hasanuddin AF MA (*Gatra*, 24 Februari 2003)

Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Ma'ruf Amin, menyalahkan ulah berbagai media elektronik yang menggeber goyang "bor" Inul di layar kaca. "Itu pornografi," kata Ma'ruf. Dan, "Pelakunya sudah berbuat maksiat," ia

menambahkan.

Goyang "bor" dengan cara meliuk-liukkan pantat itu, menurut Ma'ruf, punya implikasi sangat negatif. "Bisa memantik nafsu berahi dan kejahatan," (*Gatra*, Senin 24 Februari 2003)

Orang banyak yang malu bahkan takut bicara agama karena takut dikatakan kampungan, sementara teknologi canggih terus naik sedangkan masalah iman dan akhlak terus menurun. "Sekarang ini negara kita sudah mengalami krisis akhlak dan iman. Yang namanya hal-hal negatif cepat terangkat sementara masalah kualitas kedekatan kepada Allah akan terus banyak kendalanya. Jadi, kita tidak terkejut dengan perkembangan yang mendukung goyang erotis ini," (*Gatra*, 12 Mei 2003)

Yang lebih menarik dari komentar-komentar yang diamati, para individu atau pihak-pihak baik yang kontra ataupun pro dengan aksi goyangan para penyanyi dangdut perempuan, terutama dalam kasus Inul, tidak berani menggunakan dirinya sendiri sebagai pihak yang memerangi apa yang dikatakan erotisme, sensualitas, dan pornografi. Beberapa diantara mereka mengatasnamakan "umat Islam", "masyarakat Indonesia", "silent majority", dan lain-lain untuk mendukung pandangan yang dikemukakan. Bahkan Rhoma Irama sendiri menyatakan "banyak pihak" yang bersedia mendukung aksinya itu. Kecenderungan untuk menggunakan "atas nama" tersebut, secara linguistik telah mebiaskan peristiwa yang sebenarnya. Realitas yang awalnya hanya milik seorang menjadi, seolah milik komunalitas yang besar. Kekuatan-kekuatan "komunal" inilah yang saat ini menjadi institusi represif disamping negara. Kekuatan komunal lebih berbahaya dan radikal daripada kontrol negara terhadap media dan produk media, termasuk kepada eksistensi peran dan status kaum perempuan.

Rhoma mengingatkan orang-orang di belakang Inul agar mau peduli dengan moral bangsa. Dia mengingatkan orang-orang yang hanya ingin mengeruk keuntungan dari Inul. "Ingat, jutaan ummat di belakang saya siap jihad kalau ada orang-orang yang siap mendangkalkan moral bangsa," katanya. (*Surya*, 25 April 2003)

"Bukan hanya unsur Islam, tetapi ada juga unsur agama lain seperti Hindu, Budha, dan Konghucu yang akan ikut aksi. Ini bukti bahwa keresahan soal 'goyang Inul' merupakan keresahan nasional dan keresahan umat beragama. Semoga ini jadi konsem Baleg untuk segera menggolkan UU Anti Pornografi ini," (*Gatra*, 18 Februari 2003)

"Kita ke sini dengan niat baik untuk ikut mengangkat moral bangsa, karenanya kita mendukung adanya badan sensor untuk masalah pornografi dan pornoaksi," kata penyanyi yang mengaku lahir dan dibesarkan di lingkungan dangdut. (Fitri Elvie Sukaesih, Gatra, 18 Februari 2003)

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

VI.1. Kesimpulan

Dari berbagai analisis yang dilakukan terhadap artikel-artikel berita dan tulisan yang dimuat^o dalam media cetak yang telah dipilih, maka studi ini menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

Pertama, isu-isu yang muncul di media massa berkaitan dengan persoalan sensualitas dan goyang tubuh perempuan tidak hanya tunggal tetapi memasuki ranah-ranah yang lebih detail seperti wacana erotisme, diskursus pornografi, dan moralitas. Isu kontroversial yang berada di seputar perdebatan pro dan kontra terhadap fenomena goyang tubuh penyanyi dangdut perempuan, tidak saja terbatas pada persoalan boleh-tidaknya penyanyi dangdut bergoyang energik dan melakukan improvisasinya dipanggung, tetapi merambah pada persoalan hak asasi perempuan dan isu kekerasan terhadap perempuan.

Pada mereka yang pro kepada goyang atau aksi panggung penyanyi dangdut menyatakan bahwa pelanggaran adalah bentuk pelanggaran hak asasi atas tubuh perempuan sendiri dan melanggar kebebasan berekspresi dan kebebasan mengaktualisasikan diri pada diri perempuan. Selanjutnya dari mereka yang pro ini, kaidah-kaidah agama dipandang bukan sebagai kendala atau barrier sosial yang menolak terhadap hasil ekspresi individunya. Disisi yang lain, isu yang mencuat dipermukaan seperti persoalan moral bangsa dinyatakan tidak ada kaitannya dengan aksi goyang penyanyi dangdut seheboh apapun.



Disisi lain, mereka yang kontra, lebih mengedepankan isu-isu menganalogikan goyangan dangdut penyanyi macam Inul sebagai bentuk tarian setan yang mengarah pada persoalan erotisme. Dimana erotisme ini terkandung pula sensualitas sehingga menyebabkan aksi yang tergolong porno ini, berpengaruh atau membahayakan moral bangsa. Alih-alih membahayakan moral bangsa dan menjaga umat dari kejahatan moral, menjadi latar belakang politis yang mengemuka pada diskursus kelompok yang menolak atau melarang aksi goyang yang menonjolkan bagian-bagian tubuh perempuan yang dikategorikan feminin.

Kedua, definisi atas konsep sensualitas dan politik tubuh perempuan yang berkembang dari sumber media massa di Indonesia, yang diperoleh dari komentar-komentar dan pendapat publik tidak berhasil dirumuskan dalam definisi yang jelas. Akan halnya sensualita, diskursus yang berkembang menyatakan sebagai bentuk aksi sensual yang sengaja dipertontonkan untuk mengundang imajinasi seksual yang mengkonsumsi. Pakaian minim, terawang, dan terbuka adalah salah satu contoh bentuk sensualitas itu. Namun yang menarik, selama aksi sensual itu tidak membangkitkan selera seksual (*arouse sexual desire*), maka selama itu pula tidak termasuk dalam kategori erotis apalagi porno.

Batasan pornografi bahkan relatif dan seperti karet. Tergantung pada pemaknaan, persepsi, dan pikiran konsumen adegan-adegan atau aksi sensual di atas. Sesuatu dikatakan dalam kategori pornografi, ketika yang mempersepsi atau yang berimajinasi terangsang selera seksualnya oleh aksi tersebut. Dengan konsep berpikir "ngeres", "jelek", "tidak beres otaknya", adalah kata-kata yang dipakai dan ditujukan kepada pornografi itu sendiri. Tugas berat agaknya pada aparat penegak hukum jika memang akan merumuskan terminologi 'pornografi' dalam konteks budaya Indonesia.

Satu yang juga sempat muncul dalam diskursus ini, undang-undang atau aturan negara belum ada yang berhasil merumuskan definisi atau batasan pornografi itu sendiri.

Ketiga, bagaimana konsepsi sensualitas dan politik tubuh perempuan diartikulasikan dan dimaknai sebagai wacana gender di tanah air? Jawabannya jelas, semuanya diarahkan dan merujuk pada proses peminggiran dan pendegradasian status dan eksistensi perempuan di Indonesia. Sensualitas adalah "virus" yang melekat pada perempuan dan menyebabkan wabah kerusakan mental dan moral bangsa. Tubuh perempuan tidak dilihat secara utuh melainkan menjadi potongan-potongan tubuh yang dilihat sebagai penyebab dalam konteks penurunan iman dan mental bangsa.

Karena bagian-bagian tubuhnya yang dianggap feminin inilah, maka perempuan layak untuk dilecehkan dan disalahkan. Agen-agen yang berperan sebagai *barier* yang menghalangi perempuan untuk mengekspresikan dan mengaktualisasikan diri dalam public sphere ternyata dalam bentuk komunalitas-komunalitas eksklusif yang kebanyakan berpijak atau berbasis pada kelompok-kelompok keagamaan (terutama Islam). Kalaupun mereka individu, tapi mengatasnamakan umat, masyarakat, komunitas Islam, dan sebagainya. Institusi inilah yang dalam rumusan Foucault (1979) disebut sebagai '*disciplinary practices*' yang dengan *power* atau kekuatannya membentuk dan mengkonstruksi tubuh perempuan.

Media massa tak kalah pentingnya menjadi institusi represif atas tubuh perempuan, sekaligus pihak yang mengeksploitasi tubuh perempuan untuk kepentingan ekonomi kapitalis. Media berperan dalam mengangkat obyek-obyek budaya ke permukaan, tetapi dengan kekuatannya itulah media juga menggunakan untuk kepentingan sepihak. Eksploitasi atas tubuh perempuan pada gilirannya tidak memperbaiki pencitraan atas eksistensi perempuan, melainkan mengkonstruksi

representasi negatif atas model-model perempuan yang ada sebagai komoditi ekonomi media.

Keempat, isu-isu yang terlibat dalam proses artikulasi dan pendefinisian konsep sensualitas dan goyang tubuh perempuan di Indonesia lebih banyak didominasi oleh wacana keagamaan dan pengaruh globalisasi dalam budaya lokal. Isu-isu keagamaan memang selalu mengedepan dalam diskursus kebudayaan dan kesenian di tanah air. Agama telah menjadi salah satu “aturan” yang terkadang membelenggu kebebasan berekspresi dan aktualisasi warga bangsa, khususnya terhadap kaum perempuan. Resistensi ideologi konservatisme dan keagamaan seringkali dan sejatinya sulit untuk didobrak dalam proses modernitas di Indonesia. Agama menjadi sisi politis yang lain yang mempunyai peran signifikan dalam menentukan identitas individu, termasuk perempuan, maupun identitas kultural bangsa ini.

Sementara masuknya budaya Barat, sebagai kekuatan asing, dalam budaya lokal Indonesia selalu dilihat negatif. Proses modernisasi dalam konteks globalisasi di Indonesia berbenturan dengan nilai-nilai dan kepercayaan lokal masyarakat, dan dianggap membahayakan stabilitas keimanan dan mental bangsa. Karena itu arus globalisasi dianggap sebagai bentuk dari imperialisme budaya (Barat) terhadap budaya lokal (Indonesia), walaupun dalam konteks budaya lokal, unsur-unsur artefak budaya asing diadopsi dan diterapkan dalam keseharian masyarakat. Dalam kaitan ini, globalisasi ditunjuk sebagai salah satu faktor yang menyebarkan pengaruh erotisme dan sensualnya kepada pelaku seni di tanah air, sehingga pada akhirnya menyebabkan kemerosotan moral dan mental bangsa, yang notabene dikatakan “belum siap menerima suguhan erotisme dan sensualitas” itu (*Kompas*, 2 Mei 2003).

VI.2. Saran

Penelitian ini membatasi diri pada analisis media dan menekankan pada analisis wacana secara tekstual terhadap *documented texts* atau teks-teks yang terdokumentasi. Lebih dipersempit lagi, studi ini memfokuskan pada aspek-aspek yang saling terkait dalam konteks “pembacaan” politik identitas dan tubuh perempuan di Indonesia. Dengan pendekatan ini, studi ini hanya mampu melakukan “pemotretan” pada peristiwa-peristiwa tertentu atau *case study* sifatnya. Oleh karenanya penelitian ini tidak bisa digeneralisir dalam konteks yang besar, namun yang berhasil dilakukan adalah membaca dan memaknai secara terfokus dan detail terhadap realitas yang diamati.

Karena itu, hal-hal yang masih perlu dilakukan dari studi ini kedepan adalah *pertama*, melakukan analisis tekstual tidak terbatas pada isi media cetak, melainkan bisa dilakukan dalam media elektronik, mengingat jenis peristiwa dan tayangan media elektronik sendiri bisa diperlakukan sebagai *documented texts*. Dengan mengkombinasikan tayangan televisi dan media cetak terhadap fenomena ini, maka hasil komprehensif untuk mengetahui diskursus media atas fenomena goyang tubuh perempuan lebih berarti.

Kedua, keterbatasan akses terhadap media massa cetak tidak bisa menetapkan jumlah sampel yang diteliti. Selain karena pemilihan satuan berita atau artikel yang diambil dan dianalisis, juga alasan pemilihan media cetak yang dianalisis bersifat terbatas. Sehingga ada baiknya studi selanjutnya memperbanyak jumlah media cetak yang dianalisis sekaligus akan mendapatkan satuan berita dan artikel yang lebih banyak, karena sifatnya yang memilih isi berita ini telah membatasi kuantitas material yang dianalisis.

Ketiga, metode analisis tekstual, yang lebih mengarah pada analisis naratif ini, bisa dikombinasikan dengan analisis kuantitatif dan analisis visual representatif terhadap tayangan-tayangan atau gambar-gambar yang berhubungan dalam konteks isu yang diangkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aripurnami, Sita, 1996, 'A Feminist Comment on the Sinetron Presentation of Indonesian Women', dalam Sears, Laurie J., (Ed), *Fantasizing the Feminine in Indonesia*, London, Duke University Press
- Bartky, Sandra Lee, 2003, 'Foucault, Femininity, and the Modernization of Patriarchal Power', dalam Weitz, Rose, (Ed), *The Politics of Women's Bodies: Sexuality, Appearance and Behavior*, 2nd edition, New York, Oxford University Press
- Berger, Arthur Asa, 2000, *Communication Research Method for Qualitative and Quantitative*, New York, Sage Publication
- Boellstorff, Tom. "Gay and Lesbi Subjectivities, National Belonging And the New Indonesia". *Women in Indonesia Gender, Equity And Development*. Eds. Kathryn Robinson and Sharon Bessell. Singapore: Institute of South East Asian Studies, 2002: 92-99
- Brown, Mary Ellen, 1990, *Women Popular Culture*, Sydney, Allen and Unwin
- Butler, Judith, 2000, *Gender Trouble*, (reprinted edition), London, Routledge
- _____, 1985, *Bodies That Matter*, London, Routledge
- Foucault, Michel, 1979, *Discipline and Punish*, England, Penguin Book
- Freidan, Betty, 1984, *The Feminine Mystic*, London, Routledge
- Greer, Germaine, 1971, *The Female Eunuch*, Britain, Paladin
- Hall, Stuart, 1982, 'The Rediscovery of 'ideology': Return of the Repressed in Media Studies', dalam Gurevitch, Michael, Tony Bennet, James Curran dan Jane Woollacott, (Eds), *Culture, Society and the Media*, London, Methuen
- _____, 1972, 'Media Studies', dalam *Culture and Society, working papers in Cultural studies*, London, Open University
- _____ and Paul Du Gay, (eds), 1996, *Question of Cultural Identity*, London, Sage Publication
- Mosco, Vincent, 1995, *The Political Economy of Communication*, London, Sage Publication
- Murdoch, Graham, 1982, 'Large Corporation and the Control of the Communication Industries', dalam Gurevitch, Michael, Tony Bennet, James Curran dan Jane Woollacott, (Eds), *Culture, Society and the Media*, London, Methuen

Sunindyo, Saraswati, 1996, 'Murder, Gender, and the Media', dalam Sears, Laurie J., (Ed), *Fantasizing the Feminine in Indonesia*, London, Duke University Press

Tomlinson, John, 1991, *Cultural Imperialism: A Critical Introduction*, Baltimore, The John Hopkins University Press

Van Zoonen, Liesbet, 1996, *Feminist Media Studies*, New York, Sage Publication

Wardhana, Veven SP., 2001, *Televisi dan Prasangka Budaya Massa*, Jakarta, ISAI

Weitz, Rose, 2000, 'A History of Women's Bodies, dalam *The Politics of Women's Bodies: Sexuality, Appearance and Behavior*, 2nd ed., New York, Oxford University Press

1-1 SEP 2005

PAMERAN

MILIE
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SU-ABAYA

1944